

**REPRESENTASI ELIT POLITIK DALAM UNGGAHAN
AKUN INSTAGRAM @GEJAYANMEMANGGIL**

(Analisis Semiotika Roland Barthes)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam
Indonesia

Oleh:

Rizky Eka Satya

15321159

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**MITOS ELIT POLITIK DALAM
UNGGAHAN AKUN INSTAGRAM @GEJAYANMEMANGGIL
(Analisis Semiotika Roland Barthes)**

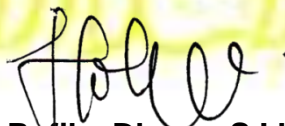
Disusun oleh

Rizky Eka Satya

15321159

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk
diujikan dandipertahankan di hadapan tim

Tanggal: 15 Januari
2021



Holy Rafika Dhona, S.I.Kom.,

NIDN 0512048302

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**MITOS ELIT POLITIK DALAM
UNGGAHAN AKUN INSTAGRAM @GEJAYANMEMANGGIL**

(Analisis Semiotika Roland Barthes)

Disusun oleh
Rizky Eka Satya
15321159

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Program
Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Tanggal : 15 Januari 2021

Dewan Penguji:

1. Ketua : Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A.
NIDN 05120483802



2. Anggota : Puji Rianto, S.IP., MA
NIDN 0503057601



Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu
Sosial
Budaya Universitas Islam Indonesia



Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom.
NIDN : 0529098201

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Rizky Eka Satya**

NIM : **15321159**

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : Mitos Elit Politik Dalam Unggahan Akun Instagram
@GejayanMemanggil (Analisis Semiotika Roland Barthes)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama pengerjaan laporan skripsi dan menyusun skripsi, saya tidak melakukan pelanggaran akademik dalam bentuk hal apapun. Hal tersebut seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, serta pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas Islam Indonesia.
2. Oleh karena itu, karya ilmiah ini merupakan hasil dari penulis. Bukan sebagai karya orang lain.
3. Apabila suatu hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bahwa skripsi ini adalah jiplakan dari karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setujui dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 9 februari 2020



(Rizky Eka Satya)

15321159

MOTTO

“Amor Fati.”

F.N

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanallahuwata'ala, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, yang telah memberikan kekuatan atas segala kelemahan umatnya. Atas rahmat Yang Maha Kuasa karya ini dapat terselesaikan dengan baik dan berjalan lancar.

Karya ini saya persembahkan kepada :

Orang tua Saya

Yasin Asyur dan Ari Susanti

Keluarga Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia

Seluruh Dosen beserta staf prodi Ilmu Komunikasi dan Teman-teman angkatan 2015

الجامعة الإسلامية
الاستاذة الأندونيسية

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “Representasi Elit Politik dalam Unggahan Akun Instagram @GejayanMemanggil (Analisis Semiotika Roland Barthes)”. Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra S1 Program Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi, Ilmu Sosial, dan Budaya Universitas Islam Indonesia.

Perkembangan internet di Indonesia, telah memberikan ruang baru dan cara baru bagi pergerakan sosial untuk mengajak masyarakat serta melakukan perubahan sosial. Salah satu dari pergerakan sosial tersebut adalah gerakan “#GejayanMemanggil” di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama kali diinisiasi pada bulan september tahun 2019.

Kemampuan internet sebagai media massa yang cepat, dapat menjangkau ke seluruh dunia, serta keamanan dan sifat keanoniman internet membuat peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana pergerakan sosial beradaptasi dengan menggunakan internet sebagai alat yang baru untuk mencapai tujuannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unggahan dari akun Instagram @GejayanMemanggil dalam menyebarkan gagasan serta ajakan yang mereka lakukan di internet. Penelitian ini akan membahas bagaimana akun Instagram @GejayanMemanggil mereproduksi makna berdasarkan memori kolektif terkait pergerakan di era reformasi 1998 dan mengadopsinya ke masa kini, khususnya ke hal-hal yang berkaitan dengan representasi dari elit politik.

Untuk memahami makna tersembunyi di akun Instagram @GejayanMemanggil, peneliti menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes untuk memahami teks secara denotatif, konotatif, hingga ke mitos yang berada di balik simbol-simbol di dalam teks tersebut. Kemudian, peneliti akan memaparkan bagaimana simbol-simbol tersebut direproduksi berdasarkan memori kolektif dari pergerakan reformasi tahun 1998.

Atas terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Kedua orang tua saya, Yasin Asyur dan Ari Susanti yang telah selalu sabar dan membantu saya secara penuh sejak saya lahir hingga saat ini.
2. Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan saya banyak pengetahuan serta membentuk cara berpikir dan cara memandang dunia sejak saya memulai studi hingga akhir studi saya di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
3. Narayana Mahendra Prastya S.Sos., M.A., selaku dosen pembimbing akademik saya, yang telah banyak membimbing dan memberi nasihat selama saya menjalankan studi saya di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh jajaran dosen dan staf di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia yang selalu membantu saya, entah yang berkaitan dengan akademis,

maupun luar akademis selama saya menjalankan studi saya di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.

5. Keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan menyemangati saya dalam menyelesaikan studi saya..
6. Seluruh sahabat dan kawan-kawan Ilmu Komunikasi UII 2015 yang selalu menjadi di masa perantauan serta perkuliahan yang selalu menyemangati satu sama lain, dan juga seluruh senior dan junior saya di Ilmu Komunikasi UII yang telah menjadi teman diskusi selama saya menulis tugas akhir ini dan telah menyumbang banyak pikiran serta pengetahuan baru terhadap tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat sesama perantauan Kalimantan Timur di Yogyakarta yang selalu menyemangati, menemani, dan memberikan dukungan kepada saya selama saya di masa perantauan.
8. Seluruh teman-teman di Lembaga Pers Mahasiswa di UII, khususnya kawan-kawan di Lembaga Pers Mahasiswa Kognisia FPSB UII yang turut menyumbang gagasan-gagasan dan cara berpikir yang kritis serta mengajarkan saya tata cara penulisan yang baik.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak tersebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Amiin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 2020

Penulis

Rizky Eka Satya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat dua hal penting yang perlu diketahui untuk memahami konsep representasi dari Stuart Hall. *Pertama*, budaya dalam konsep representasi merupakan makna yang dibagi (*Shared Meanings*) artinya orang yang berada dalam kebudayaan yang sama memahami dunia dengan cara yang hampir sama. *Kedua*, bahasa merupakan medium utama agar makna dapat dibagikan dan dapat dipahami oleh kelompok kebudayaan yang sama. Bahasa sendiri tidak hanya berupa kata-kata atau kalimat saja, segala hal yang memiliki tanda dan simbol—bersuara, tertulis, gambar elektronik, not musik, hingga objek—digunakan oleh manusia untuk merepresentasikan kepada orang lain tentang isi pikiran, gagasan, dan perasaan kita¹.

Manusia memberi makna kepada sesuatu berdasarkan bagaimana ia merepresentasikan hal tersebut, bagaimana manusia menggunakannya, memikirkan dan merasakan hal tersebut. Batu dapat dimaknai sebagaimana batu saja, namun batu juga dapat dimaknai sebagai pembatas tanah, patung, sesembahan, dan seterusnya tergantung konteksnya tersendiri. Produksi makna terjadi secara terus-menerus, di banyak tempat, dan melalui berbagai proses dan praktek. Selama manusia terus melakukan proses interaksi sosial, ditambah dengan teknologi media massa, makna akan selalu diproduksi dan bersirkulasi dalam kecepatan dan skala yang tidak dapat diketahui².

Berdasarkan paragraf di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota dari kelompok budaya yang sama harus berbagi konsep, gambaran, dan gagasan yang membuat mereka mampu untuk berpikir dan merasakan dunia dengan cara yang hampir sama. Menurut Hall:

*“Members of the same culture must share concepts, images, and ideas which enable them to think and feel about the world in roughly similiar ways. They must share, broadly speaking, the same ‘cultural codes’. In this sense, thinking and feeling are themselves ‘system of representations’.”*³

Representasi di dalam pendekatan semiotika awalnya dipahami dengan bagaimana kata-kata berfungsi sebagai tanda di dalam bahasa. Kemudian, pemahaman bahwa makna

¹ Hamilton, P. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices* (Vol. 2). Sage, 2, 4

² Ibid, 3.

³ Ibid, 4.

tergantung pada unit analisis yang lebih besar seperti narasi, pernyataan, kelompok-kelompok gambar, diskursus, dan seterusnya, mengembangkan pemahaman representasi sebagai sumber dari *social knowledge*. Hingga, pada akhirnya pendekatan semiotika terhadap representasi sebagai sumber dari *social knowledge* dan mengutamakan subjek sebagai pembuat atau sumber pemaknaan (*the author or source of meaning*)⁴.

Dalam pendekatan semiotika Roland Barthes, ia mengadopsi semiologi signifier-signified dari Saussure lalu melakukan pemaknaan hingga tingkatan konotatif dan mitos. Pada tingkat pertama yaitu *language*, *signifier-signified* dan *sign* masih berada pada tataran makna denotatif (semiologi Saussure), kemudian semiologi Barthes terdapat pada tingkat kedua yaitu *myth*, dan *sign*. Tingkat pertama (tanda denotatif) berperan sebagai *signifier* konotatif, yang bersama signified konotatif membangun sign konotatif⁵. Makna denotatif adalah makna yang sederhana, dasar, berada di tingkatan yang deskriptif dan dapat dipahami dan disetujui oleh mayoritas orang, seperti: “gelas” adalah wadah untuk menampung cairan dan digunakan untuk meminum, atau “celana” adalah pakaian yang digunakan di bagian bawah manusia, dan seterusnya. Sedangkan, makna konotatif adalah tingkatan kedua dari makna yang terhubung dengan tema-tema yang lebih luas, seperti: celana jeans yang dikonotasikan sebagai tidak rapi, sedangkan celana kain yang dikonotasikan sebagai rapi, dan seterusnya⁶. Terakhir, mitos dalam semiologi Barthes bukan berarti sekadar takhayul atau fiksi, tetapi secara spesifik merujuk kepada sesuatu yang menampilkan diri seakan-akan natural, padahal ia merupakan ekspresi dari ideologi dan pandangan dunia yang spesifik di waktu tertentu⁷.

Penelitian ini akan meneliti bagaimana perlawanan terhadap elit politik di representasikan di dalam unggahan akun @GejayanMemanggil, lalu menganalisis mitos yang tercipta dari perlawanan terhadap elit politik dengan menggunakan semiologi Roland Barthes.

@GejayanMemanggil sendiri merupakan akun official dari pergerakan sosial yang menamai dirinya dengan nama “Aliansi Rakyat Bergerak.” Nama @GejayanMemanggil sendiri berasal dari tagar yang mereka ramaikan di media-sosial “#GejayanMemanggil” yang menuntut pengkajian ulang RKUHP, perevisian UU KPK, dan penyelesaian masalah terkait tenaga kerja, lingkungan alam, serta agraria. Pergerakan sosial tersebut awalnya mulai muncul di Internet pada 22 September 2019 dan aksi protes dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terhitung sejak

⁴ Ibid, 42.

⁵Vera, N. (2014). Semiotika dalam riset komunikasi. *Bogor: Ghalia Indonesia*, 8, 30.

⁶ Hamilton, P. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices* (Vol. 2). Sage, 2, 38-39.

⁷ Allen, G. (2003). *Roland Barthes*. Psychology Press, 34.

tanggal 22 September 2019 hingga 24 September 2019, #GejayanMemanggil telah dibahas di Internet sebanyak 206.385 kali lewat media online serta platform media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube (Droneemprit.id). Aksi ini sendiri menyatakan bahwa tidak ada penokohan di dalam gerakannya, dan memilih untuk menamai diri mereka sebagai “Aliansi Rakyat Bergerak,” melalui satu-satunya media resmi mereka di Instagram (@GejayanMemanggil). Dari media resmi tersebut, mereka mengunggah konten foto, video, beserta tulisan.

Salah satu dari hal yang menarik di dalam aksi ini ialah, dalam kajian aksi yang disebarkan oleh Aliansi Rakyat Bergerak melalui situs penyimpanan awan Google Drive menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia telah dikuasai oleh pusingan oligarki lewat regulasi dan aturan yang kemudian menjadi salah satu dari tuntutan dari 7 tuntutan yang mereka berikan. Oligarki sendiri berarti kekuasaan yang dipegang oleh grup berisikan beberapa orang yang mendapatkan kekuasaan melalui kekayaan yang mereka miliki⁸. Aliansi Rakyat Bergerak mengkritik pemerintahan pasca-reformasi dan sistem desentralisasinya justru memfasilitasi pelaku bisnis dan elit politik untuk memperoleh akses ke kontrak-kontrak dan konsensi. Sehingga bagi Aliansi Rakyat Bergerak, para pelaku bisnis dan elit politik tersebut menciptakan mentalitas kekuasaan ‘elitis dan tidak inklusif’ dengan menganggap rendah masyarakat yang tidak mengerti soal hukum, politik, dan demokrasi. Mentalitas ini kemudian disebut sebagai akar masalah di dalam demokrasi Indonesia.

Istilah ‘pelaku bisnis’ dan ‘elit politik’ itu sendiri terlahir dari teori sumber kekuasaan, Korpi berpendapat bahwa teori sumber kekuasaan ialah teori yang menggambarkan bagaimana kapasitas kekuasaan didistribusikan ke seluruh bagian dari suatu komunitas politik. Faktor pengaruh dan daya ungkit dalam menentukan kekuasaan politik itu sulit untuk diukur, sehingga digunakan sumber kekuasaan untuk menentukan tingkat kekuasaan politik yang dimiliki oleh satu individu atau grup dalam suatu komunitas politik⁹. Sumber kekuasaan di dalam teori ini, dapat memengaruhi apa yang dapat dilakukan oleh satu individu atau grup dalam komunitas politik, termasuk apa yang dapat mereka ancam, atau apa yang secara logis dapat mereka antisipasi. Terdapat lima sumber kekuasaan, yakni: hak politik formal, jabatan resmi di dalam maupun di luar institusi pemerintahan, kekuatan paksaan, kekuatan mobilisasi, dan kekuatan material. Keseluruhan sumber kekuasaan tersebut umumnya menjadi basis dan didistribusikan secara eksklusif kepada elit-elit politik, kecuali sumber kekuasaan kekuatan material yang kemudian menjadi basis dari kekuatan Oligarki¹⁰. Unggahan akun @GejayanMemanggil sendiri

⁸Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, (96), 11-33.

⁹Korpi, W. (2006). The power resources model. *The welfare state reader*, 76-87.

¹⁰Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, (96), 11-33.

sebagaimana kajian aksi yang mereka terbitkan dan peneliti bahas di paragraf-paragraf sebelumnya, menyebutkan bagaimana rezim Joko Widodo merupakan hasil kerja sama antara elit politik dan oligark, namun penelitian ini sendiri akan berfokus pada representasi elit politik yang berada di dalam unggahan akun Instagram @GejayanMemanggil.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik mengenai bagaimana elit politik dan perlawanan terhadap elit politik ditampilkan dalam konten yang diunggah akun instagram @GejayanMemanggil. Konten-konten yang akan diteliti merupakan konten yang diunggah pada tanggal 23 September 2019-31 September 2019 yang ditujukan untuk panggilan aksi Gejayan Memanggil pada tanggal 23 September 2019, dan aksi Gejayan Memanggil 2 pada tanggal 31 September 2019, kemudian peneliti akan memilih konten-konten yang menurut peneliti memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah bagaimana mitos elit politik pada unggahan akun Instagram @GejayanMemanggil?

Dari rumusan masalah tersebut, dapat dipecah menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana akun Instagram @GejayanMemanggil merepresentasikan elit politik?.
2. Bagaimana akun Instagram @GejayanMemanggil merepresentasikan perlawanan terhadap elit politik?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan representasi elit politik dalam akun Instagram @GejayanMemanggil.
2. Mendeskripsikan representasi perlawanan terhadap elit politik dalam unggahan akun instagram @GejayanMemanggil.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi disiplin ilmu Komunikasi, khususnya mengenai bagaimana elit politik di Indonesia direpresentasikan.
 - b. Dapat memberikan sumbangan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian-penelitian lanjutan mengenai semiotika.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi masyarakat bagaimana memulai pergerakan sosial melalui Internet.

- b. Sebagai bahan referensi bagi kalangan akademis mengenai perkembangan Internet dan sosial media yang turut serta mengembangkan demokrasi di Indonesia
3. Manfaat Sosial
- a. Untuk memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai pergerakan sosial di Internet.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

a. Makna Poster *Di Tanah Kami Nyawa Tak Semahal Tambang* (Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce Pada Poster Kasus Pembunuhan Salim Kancil.)

Makna Poster *Di Tanah Kami Nyawa Tak Semahal Tambang* (Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce Pada Poster Kasus Pembunuhan Salim Knacil) adalah penelitian yang dilakukan Vivi Ramalia, dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom dan diterbitkan pada tahun 2006 di Jurnal *e-Proceeding of Management*: Vol.3, No. 3, Desember 2006.

Penelitian ini meneliti teks poster *Di Tanah Kami Nyawa Tak Semahal Tambang* menggunakan metode Analisis Semiotika Pierce yang kemudian ditambah dengan wawancara kepada admin akun Facebook "Komunal Stensil" yang pertama kali mengunggah poster tersebut dan kepada salah seorang mahasiswa yang mengunggah poster tersebut ke akun media-sosial pribadinya.

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa dalam analisis teks terhadap poster *Di Tanah Kami Nyawa Tak Semahal Tambang*, ditemukan makna bahwa poster ini memiliki makna adanya kekerasan terhadap kasus Salim Kancil yang dibunuh atas perjuangannya terhadap hak warga yang menolak pertambangan pasir, serta tidak adanya penghargaan terhadap nyawa manusia yang tidak sebanding dengan bisnis pertambangan di Indonesia.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah kesamaan objek penelitian yang merupakan teks yang dibuat dan diunggah ke internet oleh akun media-sosial pergerakan sosial. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah, perbedaan di metodologi dimana penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika Pierce, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode analisis semiotika Barthes.

b. Analisis Semiotika Poster Bali Tolak Reklamasi Karya Nobodycorp

Analisis Semiotika Poster Bali Tolak Reklamasi Karya Nobodycorp merupakan penelitian yang dilakukan oleh Komang Juni Pariawan, I Nyoman Sila, dan Hardiman, dari Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Universitas Pendidikan Ganesha yang diterbitkan pada tahun 2019 di Jurnal Pendidikan Seni Rupa *Undiksha*, Vol. 9(2), 2019.

Penelitian ini meneliti lima buah poster Bali Tolak Reklamasi karya NobodyCorp yang diunggah di laman <https://www.posteraksi.org> dengan menggunakan metode analisis semiotika Pierce. Poster ini sendiri merupakan salah satu poster propaganda gerakan Bali Tolak Reklamasi yang berasal dari ForBali (ForumBali), aliansi masyarakat Bali lintas sektoral yang terdiri dari lembaga dan individu baik mahasiswa, seniman, pemuda, musisi, akademisi, dan individu-individu yang peduli dengan lingkungan yang muncul dikarenakan adanya proyek reklamasi di Teluk Benoa yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Bali.

Hasil dari penelitian ini ialah, 1). Ikon berupa gambar manusia berwajah tengkorak, gambar ekskavator, gambar Pulau Bali, gelombang air laut, gambar orang siluet hitam, gambar perahu layar, gambar orang menaiki perahu, penari wanita legong Bali, gambar tangan kiri mengepal, gambar peluru bom atom, gambar gunung, gambar pura, gambar alat pengangkut material bangunan serta kata Bali 2). Indeks berupa gambar manusia berwajah tengkorak mengenakan jas, gambar Pulau Bali, Gelombang air berbentuk tangan mengepal, manusia menaiki perahu, dan logo ForBALI. 3). Simbol antara lain wajah tengkorak sebagai penggambaran kematian, ekskavator sebagai penggambaran pengerukan reklamasi, bentuk Pulau Bali sebagai penggambaran wilayah Bali, Tangan kiri mengepal simbol melawan keburukan, Siluet hitam manusia sebagai simbol sosok misterius, Perahu layar penggambaran masyarakat pesisir, penari Bali sebagai penggambaran orang Bali, bom atom sebagai penggambaran perang/kehancuran, Pura sebagai penggambaran masyarakat Hindu di Bali, Gunung sebagai penggambaran kesuburan, dan alat pengangkut material sebagai penggambaran proyek pembangunan serta berbagai warna yang memiliki simbolnya masing-masing.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah kesamaan di objek penelitian yang diteliti, yakni teks dari pergerakan sosial yang kemudian diunggah ke internet. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah, penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika Pierce, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode analisis semiotika Barthes.

c. Poster Sebagai Sarana Ekspresi Terhadap Isu Sosial dan Politik (Analisis Semiotika Akun Instagram @_asoy dalam Mengekspresikan Keadaan Sosial Politik Indonesia Melalui Media Poster di Ruang Publik Instagram).

Poster sebagai Sarana Ekspresi Terhadap Isu Sosial dan Politik (Analisis Semiotika Akun Instagram @_asoy dalam Mengekspresikan Keadaan Sosial Politik Indonesia Melalui Media Poster di Ruang Publik Instagram) adalah penelitian yang dilakukan oleh Bayu M. Rizal, dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret dan diajukan sebagai Skripsi pada tahun 2018.

Penelitian ini meneliti poster yang diunggah oleh akun pribadi media sosial Instagram Rizky Mahendra @_asoy dalam mengekspresikan isu sosial politik menggunakan metode analisis semiotika Barthes.

Hasil penelitian ini ialah terdapat muatan sosio-politis sebagai ungkapan kritik terhadap isu sosial-politik di Indonesia dimana akun @_asoy sendiri mengambil sudut pandang dari rakyat kecil yang kurang puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah di objek penelitian serta metode yang digunakan. Objek penelitian ini ialah teks propaganda berunsur sosio-politis yang diunggah ke media-sosial Instagram, dan menggunakan metode analisis semiotika Barthes. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah, akun tersebut merupakan akun pribadi yang kemudian dijadikan sebagai media ekspresi berpolitik dari si pemilik akun sedangkan objek penelitian yang dilakukan peneliti merupakan akun Instagram organisasi pergerakan sosial.

d. Negotiating the New Media Platform: Youth and Political Images in Kenya

Negotiating the New Media Platform: Youth and Political Images in Kenya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lusike Lynete Mukhongo, dari Moi University, Nairobi Campus, Kenya dan diterbitkan di jurnal *tripleC* 12(1), 2014 pada tahun 2014.

Penelitian ini meneliti mengenai media baru di Kenya dan bagaimana gambar-gambar politik Kenya yang diunggah di internet dengan perspektif pasca-struktural pemikiran Roland Barthes “Death of the Author and Camera Lucida.”

Hasil dari penelitian ini ialah, gambar-gambar yang diunggah ke internet oleh anak muda di Kenya memiliki pengaruh dalam mempromosikan stereotip politik, subjektivitas, dan hegemoni visual kepada kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan budaya. Pengawasan terhadap diskursus politik anak muda di Kenya oleh Pemerintahan Kenya, membuat anak muda di Kenya menggunakan gambar untuk mengekspresikan pendapat politiknya yang walaupun tidak secara otomatis langsung dapat dipahami, namun tetap membawa makna yang dapat diidentifikasi oleh kelompok anak muda di Kenya. Salah satunya ialah gambar manusia berkepala binatang babi yang menjadi simbol dari anggota parlemen Kenya.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah di objek penelitian yakni teks yang mengandung stereotip politik dan diunggah ke media-sosial. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan perspektif pasca-struktural dalam memandang teks sebagai suatu bentuk diskursus, sedangkan peneliti menggunakan metode analisis semiotika Barthes dalam memaknai teks dan mitos yang berada di dalamnya.

e. Kajian Poster Anti-Tank Project [Tahun 2008-2015]

Kajian Poster Anti-Tank Project [Tahun 2008-2015] adalah penelitian yang dilakukan oleh Hendy Murti S.P, dari Program Studi Desain Komunikasi Visual, Jurusan Desain, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan diterbitkan pada tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika Pierce untuk meneliti poster-poster dari Anti Tank Project pada tahun 2008 hingga 2015. Anti Tank Project adalah gerakan sosial yang diinisiasi oleh Andrew Lumban Gaol dan aktif dalam pembuatan poster propaganda di Yogyakarta sejak tahun 2008.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa poster-poster Anti-Tank Project menggunakan teknik blok vektor dengan gaya stensil dan sedikit pengaruh pop art. Gaya penulisan headline dari poster-poster tersebut ditulis dengan lugas, dan dikemas secara ironi, parodi, ataupun plesetan untuk membuat kesan kekakuan politik atau disiplin politik.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah di objek teks yang diteliti, yakni poster yang mengandung unsur sosio-politik serta stereotip dari rezim politik di Indonesia. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah, penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika Pierce sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah metode analisis semiotika Barthes. Teks dari penelitian ini juga disebar dengan cara dipasang di jalan-jalan sebagai *street-art* sedangkan poster yang diteliti oleh peneliti diunggah ke akun media-sosial Instagram dan disebar di Internet.

2. Kerangka Teori

a. Representasi

Budaya adalah sesuatu yang membuat manusia yang berada di dalam kebudayaan yang sama “berbagi makna dan peta konsep,” dikarenakan orang-orang yang berada di dalam budaya yang sama, mengkonstruksi makna serta menginterpretasi dunia dengan cara yang hampir sama¹¹. Kelompok yang dapat memproduksi dan bertukar makna dengan baik adalah kelompok yang memiliki latar belakang pengetahuan yang sama sehingga dapat menciptakan suatu pemahaman yang hampir sama. Ini dikarenakan, anggota dari budaya yang sama harus saling berbagi konsep, gambar, dan ide yang mendukung mereka untuk berpikir dan merasakan dunia dengan cara yang hampir sama, Hall menyebutnya sebagai

¹¹Hall, S. (1997). The work of representation. *Representation: Cultural representations and signifying practices*, 2, 13-74.

“*Cultural Codes.*” Sedangkan, berpikir dan merasakan dunia ia sebut sebagai “*System of representations.*”¹².

Makna merupakan hasil konstruksi dari manusia, dan membuatnya seakan-akan makna tersebut adalah hal yang alamiah dan tidak dapat diubah. Hall menyebutkan “*Things don’t mean: we construct meaning, using representational system-concepts and signs.*”¹³ Dalam proses produksi makna, konsep yang berada dalam pikiran dengan tanda menjadi bagian yang penting.

Menurut Hall, terdapat tiga pendekatan dalam memahami bagaimana makna diproduksi dan digunakan dalam konstruksi sosial: *Pertama*, pendekatan reflektif dimana sebuah makna tergantung pada sebuah objek, orang, ide, atau peristiwa nyata yang terjadi. Namun tanda visual membawa sebuah hubungan kepada bentuk dan tekstur dari objek yang dipresentasikan. *Kedua*, pendekatan intensional. Dalam hal ini; kita menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan cara pandang kita terhadap sesuatu. Pendekatan makna yang kedua dalam representasi yang mendebat sebaliknya. Pendekatan ini mengatakan bahwa sang pembicara, penulis atau siapapun yang mengungkapkan pengertiannya yang unik ke dalam dunia melalui bahasa. *Ketiga*, pendekatan konstruksi; kita mengkonstruksikan makna lewat bahasa yang dipakai. Ini adalah pendekatan ketiga untuk mengenali publik, karakter sosial, dan bahasa. Sistem representasi dari pendekatan konstruksi ini meliputi suara, gambar, cahaya pada foto, coretan-coretan yang dibuat atau representasi dapat juga disebut sebagai praktek dari objek material. Namun demikian makna tidak tergantung pada kualitas material tanda, tetapi lebih kepada fungsi simbolik.

b. Teori Sumber Kekuasaan

Konsep mengenai ‘elit politik’ mengakar pada teori sumber kekuasaan, Korpi berpendapat bahwa teori sumber kekuasaan ialah teori yang menggambarkan bagaimana kapasitas kekuasaan didistribusikan ke seluruh bagian dari suatu komunitas politik¹⁴. Faktor pengaruh dan daya ungkit dalam menentukan kekuasaan politik itu sulit untuk diukur, sehingga digunakan sumber kekuasaan untuk menentukan tingkat kekuasaan politik yang dimiliki oleh satu individu atau grup dalam suatu komunitas politik. Sumber kekuasaan di dalam teori ini, dapat memengaruhi apa yang dapat dilakukan oleh satu individu atau grup dalam komunitas politik, termasuk apa yang dapat mereka ancam, atau

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴Korpi, W. (2006). The power resources model. *The welfare state reader*, 76-87.

apa yang secara logis dapat mereka antisipasi¹⁵. Terdapat lima sumber kekuasaan, yakni: hak politik formal, jabatan resmi di dalam maupun di luar institusi pemerintahan, kekuatan paksaan, kekuatan mobilisasi, dan kekuatan material. Keseluruhan sumber kekuasaan tersebut umumnya menjadi basis dan didistribusikan secara eksklusif kepada elit-elit politik, kecuali sumber kekuasaan kekuatan material yang kemudian menjadi basis dari kekuatan Oligarki.

Kelima sumber kekuasaan tersebut terdapat di Indonesia serta memiliki perannya masing-masing di politik kontemporer Indonesia. Winters memaparkan kelima sumber kekuasaan tersebut sebagai berikut: *Pertama*, sumber kekuasaan hak politik formal yang menjangkau mulai dari kewarganegaraan, kesempatan bagi masyarakat yang telah cukup umur untuk berpartisipasi serta memilih di kontestasi demokrasi di Indonesia. *Kedua*, sumber kekuasaan jabatan resmi mulai dari jabatan formal di pemerintahan, pemimpin organisasi seperti partai politik, korporasi, serikat, organisasi agama, dll yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber daya dan personalnya. *Ketiga*, kekuatan paksaan yang berasal dari kapasitas untuk melakukan kekerasan di luar dari institusi resmi. Sehingga, kekuatan paksaan merujuk kepada tokoh-tokoh preman, pemimpin mafia, *warlord*, dan lain-lain. *Keempat*, kekuatan mobilisasi yang berasal dari kapasitas elit politik untuk menggerakkan massa dengan cara yang secara politis hebat. Seperti Soekarno sebelum menjadi Presiden. *Kelima*, kekuatan material yang menjadi basis utama kekuasaan Oligark. Kekuatan ini lebih serba guna dibandingkan empat bentuk kekuatan sebelumnya karena dapat dengan mudah diubah ke dalam bentuk kekuatan yang lain. Dari membayar bantuan legal, menggunakan uang untuk mobilisasi massa & menyewa kelompok bersenjata. Semua dapat dilakukan tanpa para oligark terlibat secara langsung dengan konflik.

F. Metodologi Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis, paradigma ini memiliki sifat dasar yang cenderung selalu curiga dan mempertanyakan kondisi di masyarakat untuk mencari bentuk – bentuk ketidakadilan yang terjadi di balik realitas sosial. Paradigma kritis mengungkapkan kenyataan yang tersembunyi di balik ilusi manusia¹⁶.

Paradigma kritis bertujuan untuk mengungkapkan kekuasaan dalam masyarakat, termasuk fenomena dengan sumber yang memiliki kekuatan melakukan kontrol sosial.

¹⁵Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, (96), 11-33.

¹⁶Hidayat, D. (2002). Metodologi Penelitian dalam Sebuah "Multi-Paradigm Science". *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 3(2), 197-220.

Paradigma kritis tidak sekedar menggambarkan mekanisme tersembunyi di dalam realitas yang diamati, tetapi juga mengkritik kondisi yang terjadi¹⁷.

Menurut Littlejohn dan Foss¹⁸ terdapat tiga karakter utama di dalam variasi pemikiran kritis, yaitu: *Pertama*, tradisi kritis berusaha memahami struktur kekuasaan, kepercayaan, dan ideologi yang diterima oleh masyarakat begitu saja (*taken-for-granted*). *Kedua*, tradisi kritis tertarik untuk menunjukkan adanya suatu bentuk penindasan sosial dan memberi alternatif suatu pengaturan kekuasaan. *Ketiga*, tradisi kritis berusaha untuk memadukan antara teori dan tindakan, sehingga dapat diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat untuk mendorong terjadinya perubahan yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan makna dan tujuan yang tersembunyi dalam unggahan akun Instagram @GejayanMemanggil. Peneliti menggunakan paradigma kritis karena peneliti berusaha untuk memahami struktur kekuasaan, kepercayaan, dan ideologi mengenai elit politik di Indonesia yang diterima oleh masyarakat begitu saja. Analisis yang akan dilakukan oleh peneliti mengutamakan analisis yang komprehensif, kontekstual, dan analisis multi-level yang dapat dilakukan dengan menempatkan diri sebagai partisipan dan memperhatikan situasi historis, sosial, budaya, dan politik dari suatu realitas sosial.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah¹⁹. Dikarenakan penelitian ini menggunakan analisis semiotika, maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif interpretatif dimana peneliti melakukan pengamatan secara menyeluruh pada tanda-tanda dalam poster yang diunggah akun Instagram @GejayanMemanggil.

Analisis semiotika yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya bersifat kualitatif interpretatif, maka peneliti memfokuskan diri pada tanda-tanda dalam poster yang diunggah akun Instagram @GejayanMemanggil, serta bagaimana peneliti menafsirkan kode di balik tanda dalam unggahan-unggahan poster tersebut yang berperan membangun realitas konstruksi dari pergerakan sosial tersebut, maka peneliti akan

¹⁷Rulli Nasrullah, M. S. (2016). *Teori dan riset media siber (cybermedia)*. Kencana.

¹⁸Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Teori komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

¹⁹Bungin, B. (2003). *Analisis penelitian kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

menginterpretasikan unggahan-unggahan poster tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati secara umum.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes. Semiotika Roland Barthes merupakan turunan dari dari semiologi Saussure yang mengajukan teori *signifier-signified*. Saussure menekankan pada penandaan dalam tataran denotatif, sedangkan Roland Barthes mengembangkan makna tanda hingga pada tingkat konotatif bahkan hingga pada mitos²⁰.



Gambar 1.1. Semiotika Barthes sebagai pengembangan Semiologi Saussure Sumber: Rekonstruksi Budiman²¹

Pada tingkat pertama yaitu *language*, *signifier-signified* dan *sign* masih berada pada tataran makna denotatif (semiologi Saussure). Pada tingkat kedua yaitu *myth*, *sign*. Tingkat pertama (tanda denotatif) berperan sebagai *signifier* konotatif, yang bersama *signified* konotatif membangun *sign* konotatif²². Mitos dalam konteks ini tidak sama dengan mitos yang biasa dipahami masyarakat sebagai cerita takhayul, tetapi sebagai perkembangan dari konotasi yang sudah terbentuk lama di masyarakat. Barthes berpendapat bahwa budaya selalu menampilkan objek ideologi yang artifisial, dan nilai-nilai yang seakan-akan natural. Proses menampilkan sebuah fenomena kultur seakan-akan ia adalah hal yang alami kemudian disebut sebagai 'ideologi'²³.

Salah satu contoh mitos yang ditulis oleh Barthes adalah cover sebuah majalah *Paris Match*. Cover majalah tersebut menampilkan foto seorang pemuda berkulit hitam, menggunakan seragam militer sambil melakukan sikap hormat. Foto yang dapat dimaknai

²⁰Vera, N. (2014). Semiotika dalam riset komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia, 8, 30.

²¹Budiman, K. (2011). *Semiotika visual: konsep, isu, dan problem ikonisitas*. Jelasutra.

²²Vera, N. (2014). Semiotika dalam riset komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia, 8, 30.

²³ Allen, G. (2004). *Roland Barthes*. London: Routledge, 34.

sebagai sekadar foto seorang prajurit Perancis berkulit hitam, dapat juga dimaknai sebagai “*that France is a great Empire, that all her sons, without any colour discrimination, faithfully serve under her flag*”²⁴.

Konsep lain semiologi Saussure yang berada di dalam semiotika Barthes ialah konsep *syntagmatic* dan *system/paradigmatic*. Syntagmatic adalah hubungan antar tanda yang saling terhubung seperti rantai sehingga terlihat adanya kesatuan makna, sedangkan system merupakan hubungan satu tanda dengan tanda lainnya yang tidak terlihat maknanya jika hanya dilihat pertanda saja²⁵.

4. Unit Analisis

Unit analisis adalah pesan yang akan diteliti melalui analisis isi. Pesan yang dimaksud berupa gambar, judul, kalimat, paragraf, adegan dalam isi film, atau keseluruhan isi pesan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah 5 unggahan yang ada di akun Instagram @GejayanMemanggil yang telah dipilih oleh peneliti.

5. Tahapan Penelitian

Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data melalui telaah dan mengkaji berbagai literatur yang sesuai dan ada hubungannya dengan bahan penelitian yang kemudian dijadikan bahan argumentasi. Data-data yang dikumpulkan dalam teknik dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer adalah berupa data yang berasal dari akun Instagram @GejayanMemanggil.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau literatur yang mendukung data primer, seperti buku, jurnal, artikel ataupun internet.

²⁴ Allen, G. (2004). *Roland Barthes*. London: Routledge, 37.

²⁵Smith, P., & Riley, A. (2011). *Cultural theory: An introduction*. John Wiley & Sons.

BAB II

GAMBARAN UNIT ANALISIS

Penelitian ini hendak berfokus pada bagaimana representasi Elit politik dalam unggahan akun Instagram @GejayanMemanggil. Dalam kajian ini, akan mempergunakan media visual sebagai unit analisis dengan fokus pada representasi Elit politik.

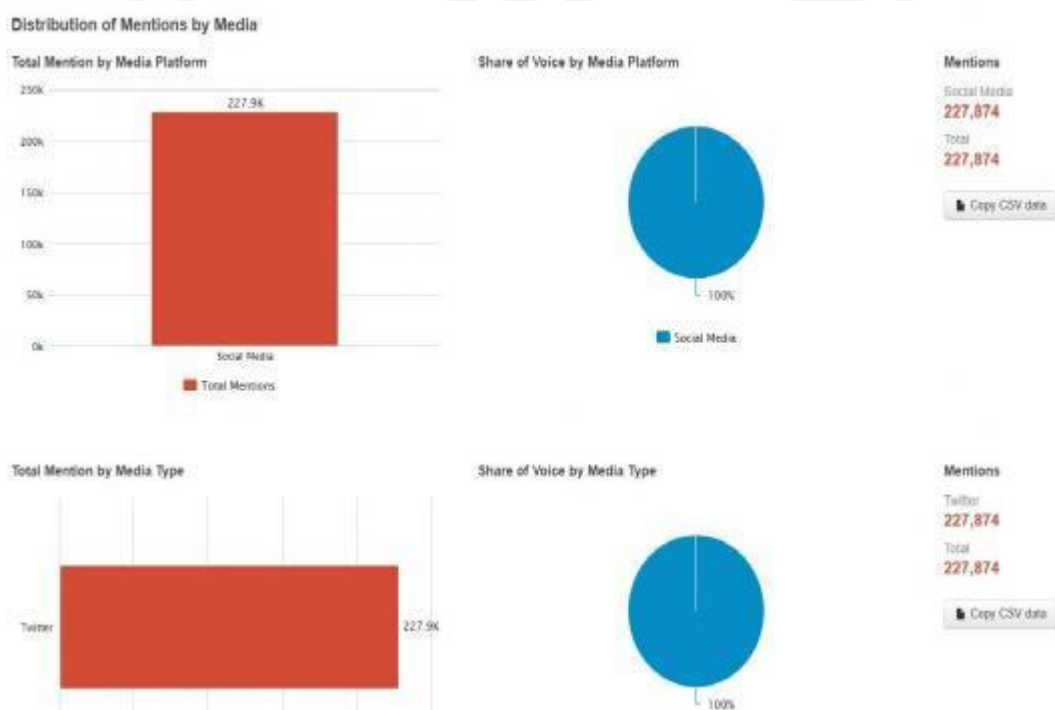
A. Profil Gerakan GejayanMemanggil

Gerakan Gejayan Memanggil merupakan gerakan yang diinisiasi oleh kelompok yang menamakan dirinya “Aliansi Rakyat Bergerak.” Dalam sebaran persnya yang diunggah di platform cloud Google Drive dan akun Instagram resminya @GejayanMemanggil, Gerakan ini diinisiasi oleh mahasiswa dari berbagai Universitas dan elemen masyarakat di Yogyakarta yang digerakkan secara kolektif karena keresahan terhadap berbagai isu nasional yang ada di Indonesia saat ini.

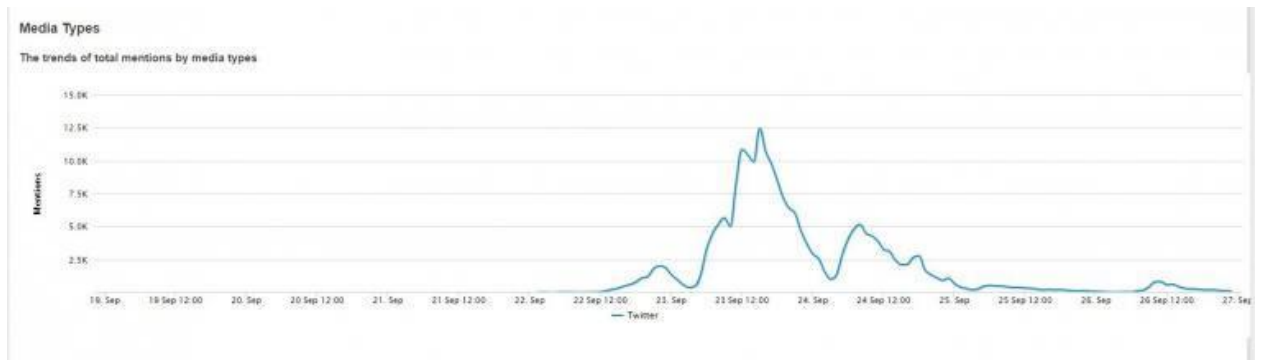
Aliansi Rakyat Bergerak telah menginisiasi beberapa aksi protes, di antaranya:

1. #GejayanMemanggil

Gerakan ini digelar pada tanggal 23 September 2019, dengan titik utama aksi di sepanjang Jalan Colombo-Gejayan, Yogyakarta. Berdasarkan data dari *social media tools* oleh Drone Emprit Academic, terdapat 227.874 cuitan yang menggunakan tagar #GejayanMemanggil tertanggal 22 September 2019 hingga tanggal 24 September 2019, dengan puncak jumlah cuitan pada tanggal 23 September 2019 dimana aksi tersebut sedang berlangsung.



Gambar 2. 1 Data Jumlah Cuitan dengan tagar #GejayanMemanggil.



Gambar 2. 2 Tingkatan cuitan dari tanggal 22 September 2019 hingga 27 September 2019.

Berdasarkan rilis pers #GejayanMemanggil, terdapat tujuh pernyataan sikap dalam aksi ini, yakni:

1. Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP.
2. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
3. Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.
4. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.
5. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria.
6. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
7. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.

2. Gejayan Memanggil 2

Gerakan ini digelar pada tanggal 30 September 2019, dengan titik utama aksi di sepanjang Jalan Colombo-Gejayan, Yogyakarta. Berdasarkan data dari *social media tools* oleh Drone Emprit Academic, terdapat 227.874 cuitan yang menggunakan tagar #GejayanMemanggil tertanggal 22

September 2019 hingga tanggal 24 September 2019, dengan puncak jumlah cuitan pada tanggal 23 September 2019 di saat aksi tersebut sedang berlangsung.

B. Unit Analisis

Ruang lingkup di dalam penelitian ini adalah unggahan akun Instagram @GejayanMemanggil selama bulan September hingga bulan November. Unit analisis data dalam penelitian ini berupa potongan-potongan unit gambar yang menunjukkan adanya unsur-unsur pembongkaran terhadap nilai Oligarki.dalam unggahan akun Instagram @GejayanMemanggil.

1. Unit Analisis 1 “Dewan Penipu Rakyat”



Gambar 2. 3 Sumber: <https://www.instagram.com/p/B2tLr2vFO-W/>

Diunggah pada tanggal 22 September 2018. Caption

Ppanjang umur perjuangan!

#GejayanMemanggil

#DiperkosaNegara

#KosongkanKampus

#SemuaBisaKena

2. Unit Analisis 2 “Usut Tuntas & Adili”



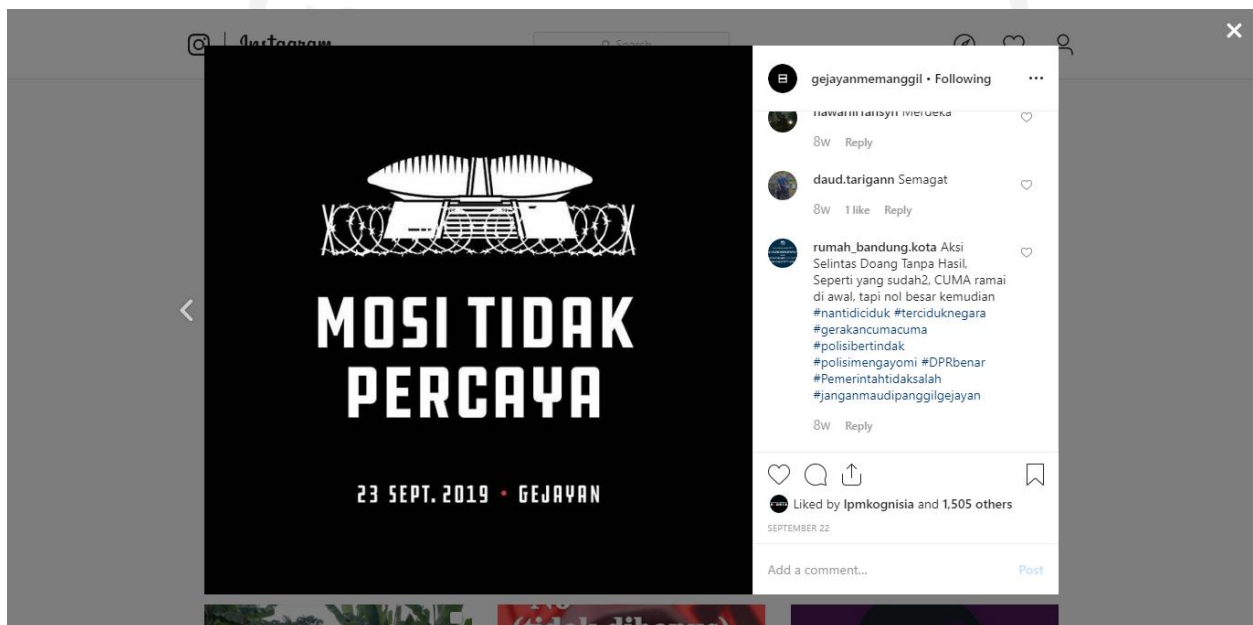
Gambar 2. 4 Sumber: https://www.instagram.com/p/B2_UiDglNp5/

Diunggah pada tanggal 29 September 2018. Caption



#GejayanMemanggil
#IndonesiaMemanggil
#KosongkanKelas
#ReformasiDikorupsi
#SemuaBisaKena
#RakyatBergerak
#HentikanRepresi

3. Unit Analisis 3 “Mosi Tidak Percaya”



Gambar 2. 5 Sumber: <https://www.instagram.com/p/B2s-5dTFUqk/>

Diunggah pada tanggal 22 September 2018. Caption

#DiperkosaNegara#KosongkanKampus#SemuaBisaKena#GejayanMemanggil

4. Unit Analisis “Adili elit-elit Pembakar Hutan”



Gambar 2. 6 Sumber: https://www.instagram.com/p/B2_WN5pFu6E/

Diunggah pada tanggal 29 September 2018. Caption

#GejayanMemanggil

#IndonesiaMemanggil

#KosongkanKelas

#ReformasiDikorupsi

#SemuaBisaKena

#RakyatBergerak

#HentikanRepresi

5. Unit Analisis 5 “WASPADAI KEMBALINYA ORDE BARU”



Gambar 2. 9 Sumber: <https://www.instagram.com/p/B496YJhl0fd/>

Diunggah pada tanggal 17 November 2018. Caption

[Maklumat] Waspadai Orde Baru kumat, Sebarkan!

BAB III

HASIL PENELITIAN

Representasi elit politik dalam unggahan akun Instagram @GejayanMemanggil tampak pada seperangkat tanda berupa bentuk, warna, tulisan, dan simbol-simbol lain yang mengandung makna. Peneliti menggunakan analisis semiotika Roland Barthes untuk mengidentifikasi makna baik denotatif, maupun konotatif pada unggahan yang menjadi objek penelitian.

A. Identifikasi Makna Denotatif dan Konotatif pada Unggahan Dewan Penipu Rakyat



Gambar 3.1 “DEWAN PENIPU RAKYAT”

Tanda-tanda pada Gambar 3.1 mengandung makna denotatif teks berwarna hitam dengan setiap huruf depannya berwarna merah bertuliskan “DEWAN PENIPU RAKYAT” yang disertai teks tagar “#SemuaBisaKena” dan ilustrasi sebuah bangunan yang dipagari dengan pagar barikade berduri. Latar belakang gambarnya sendiri berwarna kuning. Secara keseluruhan makna denotatif dari Gambar 3.1 menunjuk pada ilustrasi gedung yang dipagari dengan pagar barikade berduri, serta teks “DEWAN PENIPU RAKYAT,” dan teks “#SemuaBisaKena.”

Seperangkat tanda pada Gambar 3.1 mengandung makna konotatif yaitu makna yang timbul karena tanda-tanda diasosiasikan dengan sesuatu yang lain seperti sikap sosial, sikap pribadi, maupun konteks tertentu. Makna konotatif pada gambar 3.1 merujuk pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang tidak merepresentasikan

suara rakyat melalui teks akronim dari DPR yang diubah dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Penipu Rakyat.

Tanda berupa ilustrasi gedung sendiri memiliki makna konotatif Gedung Kompleks Parlemen tempat bertemunya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki hubungan syntagmatic dan memperkuat tanda teks “Dewan Penipu Rakyat” yang secara konotatif bermakna lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Pagar barikade berduri yang terdapat pada ilustrasi Gedung Kompleks Parlemen sendiri seringkali digunakan untuk membarikade aksi massa yang dilakukan di sekitar Gedung Kompleks Parlemen oleh aparaturnegara agar massa aksi tidak menerobos masuk ke dalam gedung. Berdasarkan hubungan syntagmatic antara tanda gedung yang dipagari dengan pagar barikade berduri, dengan tanda teks “Dewan Penipu Rakyat” maka secara konotatif ilustrasi Gedung Kompleks Parlemen yang dipagari dengan pagar barikade berduri memiliki makna konotatif objek yang diasosiasikan dengan ide mengenai DPR yang tidak mewakili aspirasi rakyat, dan menggunakan aparaturnegara sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.

Sedangkan, tanda berupa teks “Dewan Penipu Rakyat” merupakan mimesis dari “Dewan Perwakilan Rakyat.” Maka, makna konotatif dari teks “Dewan Penipu Rakyat” bahwa DPR sudah menipu rakyat dan tidak lagi menjadi representasi rakyat lewat pengubahan kata “Perwakilan” menjadi “Penipu” di teks “Dewan Penipu Rakyat.”

Tanda berupa teks tagar “#SemuaBisaKena” mengandung makna konotatif dari gerakan itu sendiri, tagar #SemuaBisaKena didasari dari penolakan masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP, Pemasarakatan, dan Pertanahan yang pada saat aksi dilakukan pada tanggal 23 September sedang dalam tahap pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tagar tersebut bermakna ajakan bagi semua elemen masyarakat untuk ikut melakukan aksi dikarenakan persepsi adanya pasal-pasal karet yang dapat mempidanakan siapapun dengan mudah, sehingga makna dari “#SemuaBisaKena” adalah semua orang dapat kena pidana dari pasal-pasal karet tersebut.

Makna konotatif di atas sejalan dengan mitos bahwa politisi hanyalah elit-elit politik yang tidak representatif, tidak membawa aspirasi rakyat, dan hanya membawa aspirasi dari kalangan golongan masing-masing, dan oligarki. Pagar barikade berkawat membawa makna penggunaan aparaturnegara sebagai alat pemerintah dalam melindungi kekayaan oligark²⁶, dimana Gedung Kompleks Parlemen bersama lembaga pemerintahan

²⁶Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, (96), 11-33.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang dibutuhkan oleh kelompok oligark dalam mempertahankan pertumbuhan pasar kapitalisme.²⁷

Tanda berupa pagar berduri di gedung kompleks parlemen yang membawa makna konotatif terpisahnya kelompok elit politik dengan masyarakat yang diperintah dikarenakan perbedaan kultur para elit politik itu sendiri yang disebut oleh McVey terlihat “alien” di mata orang-orang yang mereka kuasai²⁸. McVey menyebut bahwa kultur elit penguasa di Indonesia ini lahir di era kolonialisme ketika Penjajah Belanda terlihat alien karena tampilan dan budaya Eropanya. Elit penguasa di orde baru terlihat alien dikarenakan kekayaan yang mereka miliki serta asimilasi budaya elit penguasa dengan budaya barat. Sebagai kelompok yang alien di mata orang-orang yang dikuasai, elit penguasa di Indonesia memiliki kekurangan alat-alat retorik untuk mendapatkan loyalitas dari orang-orang yang mereka kuasai. Untuk itu, mereka menggunakan strategi demobilisasi politik. Demobilisasi politik ini menjauhkan politik dari negara dan institusi pemerintahan, sehingga negara dan institusi pemerintahan merupakan birokrat yang apolitis atau yang kemudian disebut oleh Benda sebagai ‘Beamtenstaat’, sedangkan urusan politik kemudian diserahkan kepada aparatur negara²⁹ dan penggunaan aparatur negara untuk mengukuhkan kekuasaan elit penguasa.

B. Identifikasi Makna Denotatif dan Konotatif pada Unggahan Usut Tuntas & Adili



Gambar 3. 2 "Usut Tuntas & Adili"

²⁷Robinson, R., & Hadiz, V. R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganizing of Power in Indonesia, in Indonesia Journal, Special Edition, Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics. *Cornell Southeast Asia program Publications*, (96), 35-57.

²⁸McVey, R. (1982). The Beamtenstaat in Indonesia. *Interpreting Indonesian politics: Thirteen contributions to the debate*, 84-91.

²⁹Benda, H. J. (1966). The pattern of administrative reforms in the closing years of Dutch rule in Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 25(4), 589-605.

Tanda-tanda pada Gambar 3.2 mengandung makna denotatif teks Aliansi Rakyat Bergerak berwarna hitam-putih. Di tengah terdapat ilustrasi palu dan alas kayu berbentuk lingkaran berwarna hitam putih. Di bagian paling bawah terdapat teks bertuliskan “Usut tuntas & Adili pelanggar HAM dan HAM berat.” Latar belakang dari unggahan berwarna hitam. Secara keseluruhan makna denotatif dari Gambar 3.2 menunjuk pada ilustrasi palu dan alas kayu, dan teks “Usut tuntas & Adili pelanggar HAM dan HAM berat.”

Seperangkat tanda pada Gambar 3.2 mengandung makna konotatif pada diadakannya pengadilan untuk mengusut tuntas dan mengadili pelanggar HAM dan HAM berat..

Tanda ilustrasi palu dan alas kayu berbentuk lingkaran berwarna hitam putih sendiri merupakan ilustrasi dari perangkat yang digunakan di dalam pengadilan. Pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, palu adalah 1. alat untuk memukul paku; godam; martil; 2. alat dari kayu yang dipukulkan pada meja untuk menandai dibuka atau ditutupnya secara resmi suatu pertemuan (misalnya sidang di pengadilan). Sehingga ilustrasi palu sidang sebagai perangkat wajib dalam sidang pengadilan tidak hanya memiliki makna peristiwa sidang itu sendiri, namun mewakili makna pengadilan secara keseluruhan dan juga sistem hukum.

Tanda ilustrasi palu dan alas kayu memiliki hubungan syntagmatic dengan tanda teks “Usut tuntas & Adili pelanggar HAM dan HAM berat” sehingga memperkuat makna palu sidang sebagai representasi dari pengadilan dan hukum secara keseluruhan. Kata “Usut tuntas” sebagai penggalan dari teks tersebut, dapat dimaknai sebagai tuntutan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut hingga ke akar-akarnya. Sedangkan kata “Adili pelanggar” dapat dimaknai sebagai tuntutan untuk mengadili pelaku-pelaku pelanggaran. Kata “HAM dan HAM berat” sebagai penggalan teks tersebut, dapat dimaknai untuk menyebutkan dua bentuk pelanggaran yang berbeda. Pelanggaran HAM berat yang dimaksud secara hukum di Indonesia adalah kejahatan yang meliputi kejahatan pembunuhan massal (Genosida), kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), kejahatan perang (*War Crimes*) dan *The Crime of Aggression*, sedangkan pelanggaran HAM ringan adalah kejahatan yang meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi seseorang mengekspresikan pendapatnya, dan menghilangkan nyawa orang lain.³⁰

Warna hitam yang menjadi warna utama di dalam unggahan ini, memiliki hubungan syntagmatic dengan tanda ilustrasi palu dan alas kayu, dan tanda teks Usut tuntas & Adili

³⁰Randang, I. I. E. (2018). Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut Kuhap. *LEX CRIMEN*, 7(3).

pelanggar HAM dan HAM berat. Hubungan syntagmatic tersebut menghasilkan makna konotatif warna hitam yang lekat dengan aksi kamisan yang dilakukan setiap hari kamis di berbagai tempat di Indonesia, dengan peserta aksi yang menggunakan seragam serta atribut serba berwarna hitam³¹. Aksi kamisan sendiri dilakukan untuk menuntut pemerintah agar menuntaskan kasus-kasus HAM di Indonesia.

Makna konotatif atas keseluruhan tanda dari gambar 3.2 ialah adanya kasus-kasus pelanggaran HAM dan HAM berat di Indonesia yang belum tuntas, dikarenakan adanya pendapat bahwa pelaku-pelaku yang ditangkap. Pelanggaran-pelanggaran HAM dan HAM berat di Indonesia dipandang sebagai peristiwa yang terstruktur dan masif, sehingga memiliki aktor-aktor intelektual dibalikinya yang merencanakan dan menjadi akar dari permasalahan terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM dan HAM berat yang terjadi di Indonesia.

Makna konotatif dari unggahan Gambar 3.2 terbentuk dari pengetahuan bahwa pelaku-pelaku pelanggaran HAM yang tetap bebas dan bahkan kini menjadi bagian dari elit politik dan oligark di Indonesia. Para elit politik dan oligark di Indonesia berperan dalam mengintervensi pemerintahan sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan kepentingan mereka dapat ditutup dan tidak tuntas. Dalam kasus-kasus konflik Agraria di Indonesia yang dinilai sebagai pelanggaran HAM ringan lewat perampasan dan monopoli tanah, intimidasi, teror, tindakan kekerasan, kriminalisasi, hingga memenjarakan masyarakat yang menolak tanahnya diambil oleh negara. Konflik-konflik agraria di Indonesia sebagai persoalan ekonomi-politik tidak dapat lepas dari dua aktor, yakni aktor bisnis yang memiliki kepentingan atas lahan untuk akumulasi kapital, dan aktor pemerintah yang melancarkan kebutuhan aktor bisnis tersebut.³² Konflik agraria yang terjadi di Indonesia periode 2014 hingga 2018 sendiri menimbulkan korban dengan 41 orang diduga tewas, 546 dianiaya, dan 51 orang tertembak.³³ Total luas tanah yang menjadi konflik mencapai 807.177 hektar dengan sektor perkebunan sawit yang mendominasi tanah mencapai 591.640 hektar.³⁴ Untuk kasus-kasus HAM berat, salah satu nama yang sering disinggung ialah Wiranto. Wiranto sendiri pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia periode 2016-2019, sedangkan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo menjabat sebagai Ketua Dewan

³¹ Ristiano, Christoforus. (2019). 8 Fakta Tentang 12 Tahun Aksi Kamisan, Hanya Sekali diajak Masuk Istana. <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/12072721/8-fakta-tentang-12-tahun-aksi-kamisan-hanya-sekali-diajak-masuk-ke-istana?page=all> Diakses pada tanggal 28 Januari 2020.

³²Ananta, D. D. (2017). Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. *Jurnal Politik*, 2(1), 101-135.

³³Agraria, K. P. (2018). Catatan Akhir Tahun 2018: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik. *Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria*.

³⁴*Ibid*

Pertimbangan Presiden. Selama Wiranto berkarir di militer, terdapat beberapa kasus HAM berat yang melibatkan namanya, berdasarkan catatan Komnas HAM kasus-kasus tersebut ialah: peristiwa penyerangan 27 Juli, Tragedi Trisakti, peristiwa Mei 1998, peristiwa Semanggi I dan II, penculikan dan penghilangan aktivis prodemokrasi tahun 1997/1998, dan peristiwa Biak Berdarah.³⁵ Kemudian, partisipasi Wiranto di dalam Partai Golongan Karya telah mengamankan posisinya sebagai bagian dari elit politik dan Oligarki di Indonesia³⁶ dan menimbulkan asumsi intervensi darinya dalam menutup-nutupi kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Riset yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tanggal 23 September 2019 hingga 4 Oktober 2019 pada 1.200 responden yang tersebar di 34 Provinsi menyebutkan bahwa publik meragukan pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.³⁷ Terdapat empat kasus pelanggaran HAM yang diteliti oleh Litbang Kompas di dalam riset tersebut yakni: kasus penculikan aktivis 1997-1998, kasus penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Semanggi-Trisakti 1998, dan kerusuhan 1997³⁸. Ketidakpercayaan ini didasari pada adanya dugaan keterlibatan elit politik dalam pengadilan HAM, lewat diikutsertakannya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengambilan keputusan mengenai Pengadilan HAM *ad hoc*.³⁹ Perumusan Undang-Undang Pengadilan HAM juga dinilai prematur dan sifatnya politis. Politis dalam artian UU Pengadilan HAM mampu menghindari dibawanya pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan internasional dan dapat diintervensi secara mudah oleh elit-elit politik.⁴⁰

C. Identifikasi Makna Denotatif dan Konotatif pada Unggahan Mosi Tidak Percaya

³⁵ Sasongko, Joko Panji. (2016). KontraS: Wiranto di Deret Depan Pelanggar HAM Berat. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160727160156-20-147439/kontras-wiranto-di-deret-depan-pelanggar-ham-berat> Diakses pada tanggal 5 Januari 2020.

³⁶Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.

³⁷ Purnamasari, Deti Mega. (2019). Survei Litbang Kompas soal Nasib Kasus HAM di era Jokowi Selengkapnya. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/05/09193641/survei-litbang-kompas-soal-nasib-kasus-ham-di-era-jokowi-selengkapnya?page=all> Diakses pada tanggal 5 Januari 2020.

³⁸*Ibid*

³⁹Halili, H. (2016). Politik penegakan hak asasi manusia pada masa transisi di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2), 199-208.

⁴⁰*Ibid*



Gambar 3. 3 “Mosi Tidak Percaya”

Tanda-tanda pada Gambar 3.3 mengandung makna denotatif ilustrasi Gedung yang dipagari dengan barikade kawat. Di bawah ilustrasi terdapat teks “MOSI TIDAK PERCAYA” berwarna putih, disertai teks “23 Sept. 2019 * GEJAYAN.” Latar belakang dari unggahan tersebut didominasi warna hitam.

Seperangkat tanda pada Gambar 3.3 mengandung makna konotatif yaitu makna yang timbul karena tanda-tanda diasosiasikan dengan sesuatu yang lain seperti sikap sosial, sikap pribadi, maupun konteks tertentu. Makna konotatif pada Gambar 3.3 merujuk pada sikap mosi tidak percaya terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, dan seruan untuk menyatakan sikap mosi tidak percaya di Gejayan pada tanggal 23 September 2019.

Sebagaimana ilustrasi Gedung Parlemen di Gambar 3.1, tanda berupa ilustrasi Gedung Kompleks Parlemen di Gambar 3.3 memiliki makna yang sama yakni gedung tempat bertemunya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara konotatif, ilustrasi tersebut tidak sekadar merujuk pada Gedungnya saja, namun merujuk kepada lembaga pemerintahan yang menggunakan gedung tersebut. Gedung Kompleks Parlemen yang dipagari barikade berduri yang berada di dalam ilustrasi itu sendiri seringkali digunakan untuk membarikade aksi massa yang dilakukan di sekitar Gedung Kompleks Parlemen oleh aparaturnegara agar massa aksi tidak menerobos masuk ke dalam gedung.

Tanda berupa teks “MOSI TIDAK PERCAYA” berasal dari pernyataan “*Motion of no-confidence*” yang pertama kali dilakukan oleh parlemen Britania Raya terhadap Perdana Menteri Lord North atas kekalahan Britania Raya di Yorktown pada peperangan revolusi Amerika.⁴¹ Tradisi ini kemudian dikenal di pemerintahan dengan sistem parlementer sebagai

⁴¹ Devenish, G. (2015). 'A comedy of errors': parliament's conduct in relation to the tabling of a motion of no confidence in the President: case notes. *Southern African Public Law*, 30(1), 290-301.

pernyataan anggota kabinet terhadap seseorang yang dianggap telah tidak becus dalam menjalankan pemerintahan. Mosi tidak percaya kemudian menjadi cara mudah bagi parlemen dalam sistem parlementer untuk menjatuhkan kabinet dengan memberikan ketidakpercayaan terhadap kinerja kabinet dan terhadap kinerja pemerintah.⁴² Di Indonesia sendiri pada masa demokrasi liberal Indonesia ketika Indonesia menjalankan sistem pemerintahan parlementer, terdapat dua peristiwa digunakannya mosi tidak percaya untuk menjatuhkan kabinet yakni pada tanggal 21 Maret 1951 yang menjatuhkan kabinet Natsir dan pada tanggal 2 Juni 1953 yang menjatuhkan kabinet Wilopo.⁴³

Tanda berupa teks “23 Sept.2019 * GEJAYAN” memiliki pernyataan ajakan untuk melakukan aksi Gejayan Memanggil yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019, dengan lokasi demonstrasi di Gejayan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi Gejayan sendiri dipilih karena adanya memori kolektif perlawanan terhadap pemerintah dengan Peristiwa Gejayan pada tanggal 8 Mei 1998. Peristiwa Gejayan merupakan demonstrasi menuntut reformasi dan turunnya Presiden Soeharto yang berujung pada kekerasan aparat yang melukai ratusan orang, dan menewaskan satu orang yang bernama Moses Gatutkaca. Sehingga aksi yang dilaksanakan di Gejayan pada tanggal 23 September 2019 memiliki hubungan sejarah kolektif dengan aksi yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 1998. Sehingga, Gejayan sendiri walaupun tidak ditampilkan secara visual dan hanya sekadar melalui teks “Gejayan” saja, namun ia sudah memiliki makna konotatif object yang diasosiasikan dengan penolakan pemerintahan yang berkuasa dan aparaturnya yang sering kali represif terhadap masyarakat sipil.

Tanda-tanda konotatif atas ungghahan “MOSI TIDAK PERCAYA” dapat dihubungkan dalam mitos terkait pernyataan mosi tidak percaya itu sendiri. Di masa presidensial, makna dari pernyataan mosi tidak percaya mengalami pergeseran makna. Mosi tidak percaya menjadi pernyataan ketidakpercayaan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan di pemerintahan apa pun itu, dan tidak hanya kabinet saja atau perdana menteri seperti yang ada di dalam tradisi sistem pemerintahan parlementer. Beberapa, penggunaannya di antaranya ialah pada tahun 2014 Koalisi Indonesia Hebat di DPR RI menggunakan pernyataan mosi tidak percaya untuk membuat pimpinan DPR tandingan⁴⁴, lalu kubu Prabowo-Hatta pada tahun 2014 yang menyatakan mosi tidak percaya

⁴²AR, H. Y. (2013). *Presidensialisme Setengah Hati*. Gramedia Pustaka Utama.

⁴³Simanjuntak, P. N. H. (2003). *Kabinet-kabinet Republik Indonesia: dari awal kemerdekaan sampai reformasi*. Djambatan.

⁴⁴ Ihsanuddin. (2014). Koalisi Indonesia Hebat Akan Layangkan Mosi Tidak Percaya kepada Pimpinan DPR. <https://nasional.kompas.com/read/2014/10/29/15222141/Koalisi.Indonesia.Hebat.Akan.Layangkan.Mosi.Tidak.Percaya.kepada.Pimpinan.DPR> diakses pada tanggal 5 Januari 2020.

pada KPU⁴⁵, kemudian lagu “Mosi Tidak Percaya” dari band Efek Rumah Kaca pada tahun 2008. Dari lagu Mosi Tidak Percaya Efek Rumah Kaca, pernyataan tersebut kemudian digunakan oleh masyarakat sipil non-politikus untuk menyatakan ketidakpercayaan terhadap kebijakan DPR yang mengesahkan revisi Undang-Undang KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada demonstrasi yang berlangsung selama bulan September hingga Oktober di tahun 2019. Maka mosi tidak percaya dapat dimaknai sebagai pernyataan dari masyarakat sipil atas ketidakpercayaan terhadap DPR, sehingga satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan tersebut hanyalah dengan pengunduran diri seluruh anggota DPR dan dilaksanakan kembali pemilihan umum ulang. Ketidakpercayaan tersebut berasal dari mitos Oligarki di dalam tubuh DPR RI, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak memihak pada publik namun memihak pada kepentingan modal. Pragmatisme politik masyarakat Indonesia pasca reformasi 1998 telah membentuk kekuatan finansial sebagai faktor determinan dalam kemenangan kandidat politik⁴⁶, ditambah dengan lahirnya kelompok kelas baru dengan konsentrasi kekayaan yang besar di masa orde-baru yang terus berusaha mempertahankan kekayaannya⁴⁷ melanggengkan praktik Oligarki di Indonesia dengan kebijakan-kebijakan DPR RI yang pro terhadap kepentingan Oligarki. Sehingga, ketidakpercayaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota DPR RI periode 2014-2019 saja, namun ditujukan kepada DPR sebagai lembaga itu sendiri yang telah lekat dengan elit-elit politik dan Oligark yang terus melahirkan tokoh-tokoh baru di dalamnya. Hal tersebut dapat terlihat di dalam tanda teks “MOSI TIDAK PERCAYA” yang ditujukan kepada tanda ilustrasi Gedung Kompleks Parlemen yang dipagari barikade kawat. Barikade tersebut membawa makna DPR sebagai lembaga telah memisahkan diri dari aspirasi masyarakat.

D. Identifikasi Makna Denotatif dan Konotatif pada Unggahan Adili elit-elit Pembakar Hutan

⁴⁵ Wijaya, Muhammad Akbar. (2014). Kubu Prabowo Hatta Sampaikan Mosi Tidak Percaya KPU ke DPR. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/06/n9vscq-kubu-prabowohatta-sampaikan-mosi-tidak-percaya-kpu-ke-dpr> diakses pada tanggal 5 januari 2020.

⁴⁶Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara “Party-ID” dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 17.

⁴⁷Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, (96), 11-33.

**Adili elit-elit Pembakar Hutan
dan perusak lingkungan di
Indonesia, Cabut Izin Usaha
Perusahaan Bermasalah.**



Gambar 3. 4 “Adili elit-elit Pembakar Hutan”

Tanda-tanda pada Gambar 3.4 mengandung makna denotatif teks “ALIANSI RAKYAT BERGERAK” yang dikelilingi persegi berwarna hitam. Di bawah tanda teks “ALIANSI RAKYAT BERGERAK” terdapat teks “Adili elit-elit Pembakar Hutan dan perusak lingkungan di Indonesia, Cabut Izin Usaha Perusahaan Bermasalah.” Di bagian paling bawah, terdapat tanda berupa foto kebakaran di hutan yang diubah menjadi warna hitam putih. Latar belakang dari unggahan tersebut didominasi warna putih.

Makna konotatif pada Gambar 3.4 merujuk pada tuntutan dari Aliansi Rakyat Bergerak untuk mengadili elit-elit pembakar hutan dan perusak lingkungan di Indonesia, dan mencabut izin usaha perusahaan yang bermasalah dikarenakan kasus pembakaran hutan dan perusakan lingkungan di Indonesia.

Tanda berupa logo “ALIANSI RAKYAT BERGERAK” mengandung makna bahwa pesan tersebut dibawa oleh kelompok yang menamakan diri sebagai “Aliansi Rakyat Bergerak.” Aliansi Rakyat Bergerak sendiri merupakan penggagas gerakan Gejayan Memanggil serta pengelola akun Instagram @GejayanMemanggil.

Tanda berupa teks “Adili elit-elit Pembakar Hutan dan perusak lingkungan di Indonesia, Cabut Izin Usaha Perusahaan Bermasalah” memiliki hubungan syntagmatic dengan tanda “ALIANSI RAKYAT BERGERAK” sehingga mengandung makna konotatif bahwa Aliansi Rakyat Bergerak menuntut diadilinya elit-elit Pembakar Hutan dan perusak lingkungan di Indonesia, serta dicabutnya usaha Perusahaan yang terlibat dalam kasus pembakaran hutan dan perusakan lingkungan di Indonesia. Berdasarkan laporan Mongabay “Kebakaran Hutan dan Lahan Sampai September 2019 Hampir 900 Ribu Hektar”⁴⁸ menyebutkan bahwa dari 900 Ribu Hektar lahan yang 80% dari lahan digunakan untuk

⁴⁸ Nugraha, Indra. (2019). <https://www.mongabay.co.id/2019/10/22/kebakaran-hutan-dan-lahan-sampai-september-2019-hampir-900-ribu-hektar/> diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

perkebunan, dengan 99% kebakaran lahan disebabkan oleh tindakan manusia yang disengaja.

Tanda-tanda konotatif atas unggahan “Adili elit-elit Pembakar Hutan” dapat dihubungkan dalam mitos mengenai kebakaran hutan dan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang dikuasai oleh para oligark dengan mengatur kebijakan dan regulasi untuk memudahkan eksploitasi sumber daya alam tersebut, terutama dengan membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan.

Penggunaan kata “elit-elit” dalam kalimat “elit-elit pembakar hutan” bermaksud bukan hanya pelaku lapangan pembakar hutan itu sendiri, namun ke aktor intelektual di belakangnya, yakni oligark yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan lahan sehingga dapat digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Hal ini juga berlaku kepada kata “perusak lingkungan” yang tidak ditujukan bagi perusak lingkungan skala kecil seperti membuang sampah sembarangan, atau menggunakan barang yang terbuat dari material yang tidak dapat didaur-ulang. Perusak lingkungan di dalam tanda ini ditujukan secara spesifik kepada kapitalisme yang rakus dalam mengeksploitasi alam, serta menjadi penyumbang terbesar kerusakan lingkungan⁴⁹. Dalam skala daerah di Indonesia, kepentingan bisnis dan kerusakan lingkungan dapat terlihat di Nagan Raya dimana jabatan strategis politik digunakan untuk mempermudah jalan dalam membangun industri dan perusahaan, penambahan Hak Guna Usaha (HGU), dan monopoli harga barang sawit⁵⁰, lubang tambang di Kalimantan Timur⁵¹, pembangunan pabrik semen di Pati yang mencemari air⁵², serta perampasan hutan adat Talang Mamak di Provinsi Riau yang digunakan untuk kepentingan Oligark⁵³. Kebakaran hutan ini menurut Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)⁵⁴ disebabkan oleh ketiadaan komitmen Presiden Joko Widodo terhadap lingkungan hidup yang terlihat dari absennya topik lingkungan hidup dan HAM di pidato pelantikan periode keduanya. Penyebab utamanya ialah menguatnya oligarki dalam mempengaruhi penetapan nomenklatur dan penyusunan nama-nama kabinet yang lebih

⁴⁹Pranadji, T. (2017). Kesenakahan, Kemiskinan, dan Kerusakan Lingkungan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 3(4), 313-325.

⁵⁰Faudhiah, D. (2019). *Oligarki Politik: Pertemuan Kepentingan Bisnis dan Kepentingan Politik Di Nagan Raya* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

⁵¹Albertus, F., & Zalukhu, Y. (2019). Dampak Dan Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Di Kalimantan Timur. *Legalitas*, 4(1), 42-56.

⁵²Kurniawan, A. W. (2018). *Gerakan petani dalam pro kontra pembangunan pabrik semen di Desa Brati Kecamatan Kayen KABupaten Pati* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

⁵³Charin, R. O. P., & Hidayat, A. (2019). The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to Maintain Their Existence in Customary Forest Resources Battle. *Society*, 7(1), 21-36.

⁵⁴Walhi.id. (2019) <https://walhi.or.id/dalam-pusaran-oligarki-masa-depan-suram-membayangi-pemerintahan-indonesia-maju> diakses pada tanggal 22 Januari 2020.

mengutamakan stabilitas politik dibandingkan dengan memperhatikan permasalahan rakyat dan lingkungan hidup.

Tuntutan untuk mengadili elit-elit pembakar hutan, perusak lingkungan, dan perusahaan bermasalah itu sendiri muncul dikarenakan adanya perusahaan-perusahaan yang bermasalah terkait eksploitasi alam, termasuk kegiatan pembukaan lahan perkebunan sawit dengan melakukan pembakaran hutan namun tidak diadili karena adanya perlindungan dari pemerintahan itu sendiri. Beberapa kasus perusahaan bermasalah yang belum diadili dikarenakan perusakan lingkungan ialah, 10 perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas di Kalimantan yang berdasarkan laporan Greenpeace terlibat dalam pembakaran hutan seluas 5.000 hektar namun tidak menerima sanksi apa pun⁵⁵.

E. Identifikasi Makna Denotatif dan Konotatif pada Unggahan Waspada Kembalinya Orde Baru



Gambar 3. 5 “WASPADA KEMBALINYA ORDE BARU”

Tanda-tanda pada Gambar 3.5 mengandung makna denotatif berwarna putih berbentuk persegi dengan garis di tengahnya. Di bawah logo terdapat teks “WASPADAI KEMBALINYA ORDE BARU.” Di bawah teks tersebut, terdapat teks berwarna merah bertuliskan “Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ingin menghentikan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.” Di bawah teks berwarna merah, terdapat teks berwarna putih dengan ukuran font yang lebih kecil bertuliskan “Kalau rencana itu terlaksana, negara akhirnya hanya diatur oleh tawar-menawar politik para oligarki di pemerintahan dan dewan, persis seperti di masa Orde Baru. Apalagi, partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah telah bersepakat untuk mengamandemen UUD 1945 guna menghidupkan lagi

⁵⁵ Arumingtyas, Lusia. (2019). “Kebakaran Berulang di Perusahaan Sawit dan Bubur Kertas Masih Minim Sanksi” <https://www.mongabay.co.id/2019/09/28/kebakaran-berulang-di-perusahaan-sawit-dan-bubur-kertas-masih-minim-sanksi/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2020.

Garis-garis Besar Haluan Negara. Secara politik, itu berarti menempatkan presiden kembali menjadi mandataris MPR.” Di bawah teks tersebut, terdapat teks berwarna putih dengan font yang berukuran lebih besar dan ditebali bertuliskan “kawal terus demokrasi kita!” Latar belakang dari unggahan tersebut didominasi warna ungu dengan foto seorang laki-laki berseragam dengan mata yang ditutup objek persegi panjang berwarna hitam.

Makna konotatif pada Gambar 3.5 merujuk pada himbuan dari akun @GejayanMemanggil terkait usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengubah sistem pilkada langsung ke pilkada asimetris⁵⁶. Perubahan sistem pilkada langsung ke pilkada asimetris ini akan berakibat kembalinya sistem pemerintahan orde baru yang akan mengancam kebebasan demokrasi di era pasca-reformasi.

Tanda berupa logo berbentuk persegi dengan garis putih di tengah merupakan simbol dari Aliansi Rakyat Bergerak mengandung makna bahwa pesan tersebut dibawa oleh Aliansi Rakyat Bergerak sendiri sebagai penggagas gerakan Gejayan Memanggil serta pengelola akun Instagram @GejayanMemanggil. Simbol tersebut memiliki makna visual “sama dengan”, “bendera Indonesia tanpa warna”, dan “garis sentral horisontal.” Makna konotatif dari masing-masing makna denotatif tersebut adalah: *Pertama*, “sama dengan” yang secara konotatif berarti ‘ekualitas’, serta pergerakan yang tidak eksklusif untuk golongan tertentu saja. *Kedua*, “bendera Indonesia tanpa warna” yang secara konotatif berarti Indonesia yang sedang berduka atau ‘tanpa warna’, dan hanya suara rakyat lah yang mampu mengisi warna kemerdekaan di Indonesia. *Ketiga*, “garis sentral horisontal” yang secara konotatif bermakna solidaritas dari seluruh elemen yang terlibat.

Tanda berupa teks “WASPADAI KEMBALINYA ORDE BARU” mengandung makna konotatif bahwa Aliansi Rakyat Bergerak menghimbau untuk mewaspadai kebangkitan orde baru. Orde baru sendiri adalah sebutan untuk masa pemerintahan Soeharto yang diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dan diakhiri dengan pengunduran diri Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998. Tanda tersebut ditulis dengan penggunaan huruf kapital untuk menekankan bahwa tanda ini merupakan peringatan yang penting. Tanda ini secara konotatif juga bekerja sebagai *statement of facts* sehingga telah terasimilasi sebagai suatu hal yang logis, dan masuk akal tanpa perlu dipertanyakan kembali.

Tanda berupa teks “Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ingin menghentikan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung,” mendukung teks “WASPADA KEMBALINYA ORDE BARU” yang secara paradigmatic tidak dapat dibaca sebagai satu tanda tersendiri dan untuk memperkuat makna konotatif *statement of facts* dari tanda

⁵⁶ Prabowo, Dani. 2019. “Pilkada Asimetris antara Politik berbiaya mahal dan evaluasi parpol.” <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/22/06442131/pilkada-asimetris-antara-politik-berbiaya-mahal-dan-evaluasi-parpol> diakses pada tanggal 23 Januari 2020.

tersebut. dan dapat dimaknai bahwa usaha Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menghentikan pilkada langsung merupakan usaha untuk mengembalikan sistem pemerintahan kembali seperti sistem pemerintahan Orde Baru, ketika kepala daerah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung lewat mekanisme pemilihan kepala daerah, namun dipilih oleh DPRD daerah masing-masing.

Tanda berupa teks “Kalau rencana itu terlaksana, negara akhirnya hanya diatur oleh tawar-menawar politik para oligarki di pemerintahan dan dewan, persis seperti di masa Orde Baru. Apalagi, partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah telah bersepakat untuk mengamandemen UUD 1945 guna menghidupkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara. Secara politik, itu berarti menempatkan presiden kembali menjadi mandataris MPR,” mengandung pesan informasi untuk mengaitkan konteks teks “WASPADA KEMBALINYA ORDE BARU” dengan teks “Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ingin menghentikan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.” Ketiga tanda ini memiliki hubungan paradigmatic yang dapat dimaknai bahwa usaha Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengubah sistem pilkada dari langsung menjadi asimetris pada akhirnya akan membuat lembaga DPRD menjadi lembaga yang lebih kuat daripada lembaga eksekutif sehingga hanya membuat jabatan kepala daerah menjadi jabatan yang rentan dengan negosiasi politik oligark di pemerintahan dan di dewan. Usaha tersebut ditengarai akan berakhir dengan kembalinya sistem di orde baru, ketika MPR dapat menetapkan GBHN dan MPR akan memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan eksekutif sehingga melepas kekuatan rakyat di dalam pemerintahan dan memberi kekuatan tersebut ke sekelompok oligark dan elit-elit politik, sehingga mengembalikan sistem pemerintahan kembali ke sistem pemerintahan orde baru.

Tanda berupa teks “kawal terus demokrasi kita!” mengandung hubungan tanda paradigmatic sehingga tidak dapat dibaca sebagai tanda tersendiri, namun perlu dikaitkan dengan tanda-tanda lain yang berkaitan. Dari makna konotatif tanda-tanda lain yang memiliki makna adanya usaha pengembalian sistem pemerintahan kembali ke sistem pemerintahan orde baru yang menunjang pertumbuhan elit-elit politik dan oligark. Maka tanda teks “Kawal terus demokrasi kita!” secara konotatif memiliki makna ajakan bagi masyarakat untuk tetap mengawal demokrasi di Indonesia. Kata “kita” di dalam teks tersebut merujuk kepada masyarakat Indonesia. Sedangkan kata “demokrasi” di dalam teks tersebut dapat dimaknai sebagai partisipasi masyarakat secara langsung untuk memilih kepala daerah dan kepala negaranya sendiri, dan bukan melalui pemberian mandat oleh DPR.

Tanda berupa foto seorang laki-laki berseragam dengan mata yang ditutup objek persegi panjang berwarna hitam merujuk kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sedang menggunakan seragam kepolisian. Tito Karnavian sendiri sebelum menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Objek

persegi panjang berwarna hitam yang menutupi daerah di sekitar matanya merupakan bentuk *aestheticism* untuk menciptakan makna konotatif Tito Karnavian sebagai seorang penjahat. Di Indonesia sendiri, penyensoran umum dilakukan kepada pelaku kejahatan entah dengan menggunakan topeng wajah, atau dengan menyensor bagian wajah dari pelaku kejahatan. Kejahatan yang dimaksud di dalam tanda ini sendiri tidak terkait dengan pernyataan Tito Karnavian tentang perubahan sistem pilkada, namun merujuk kepada kasus “Buku Merah” yang melibatkan nama Tito Karnavian semasa ia masih bertugas di kepolisian⁵⁷. Makna konotatif ini timbul dari hubungan syntagmatic antara sensor di bagian mata Tito Karnavian, dengan seragam kepolisian yang digunakan oleh Tito Karnavian yang saat unggahan ini diunggah, sudah tidak bertugas lagi di kepolisian.

Tanda-tanda konotatif atas unggahan “WASPADAI KEMBALINYA ORDE BARU” dapat dihubungkan dalam mitos kekuatan elit politik yang bersumber dari kekuatan militer. Istilah ‘orde baru’ sendiri pertama kali digunakan oleh mahasiswa pendukung militer pada tahun 1966⁵⁸ untuk membedakan diri dari era rezim Soekarno yang disebut dengan era ‘orde lama’ untuk melambangkan kekolotan dan kapasitas yang rendah untuk beradaptasi dengan hal-hal yang dicap sebagai modern. Rezim orde baru sendiri merupakan rezim ‘repressive-developmentalism’⁵⁹ atau rezim yang memegang misi modernisasi namun di satu sisi juga memegang teguh nilai-nilai konservatif yang kuno untuk mencapai misi modernisasi tersebut. Era orde baru di satu sisi memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan era kelahiran kelas menengah baru urban. Namun, untuk mencapai misi modernisasi tersebut menggunakan propaganda ‘ideologi pancasila’ untuk membentuk masyarakat yang statis, patuh, pasif, dan dijadikan untuk melegitimasi kekuasaan yang menyuburkan korupsi.⁶⁰ Maka, dapat dilihat bahwa model pembangunan orde baru yang mengambil kebijakan untuk mengontrol secara ketat aktivitas politik demi kemajuan ekonomi justru dikritik karena hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang menikmati kemajuan ekonomi tersebut dan menciptakan kesenjangan ekonomi di masyarakat⁶¹ dan menjadi tonggak awal kelahiran kelompok oligark di Indonesia⁶².

⁵⁷ Tim Indonesia Leaks. *Indonesialeaks Bukti Baru Buku Merah*. (2019). <https://investigasi.tempo.co/317/indonesialeaks-bukti-baru-buku-merah> Diakses pada tanggal 29 Januari 2020.

⁵⁸Aspinall, E., & Fealy, G. (Eds.). (2010). *Soeharto's new order and its legacy: essays in honour of Harold Crouch* (Vol. 2). ANU E Press.

⁵⁹Feith, H. (1980). Repressive-developmental regimes in Asia: Old strengths, new vulnerabilities. *Prisma*, 19(1), 39-55.

⁶⁰Op. cit.

⁶¹Ilmar, A. (2017). Pembangunan dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru: Dari Teknokratis ke Populis?. *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, 3(1).

⁶²Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, (96), 11-33.

Rezim repressive-developmentalism yang memiliki corak sentralisme kekuasaan yang kental, membuat para pelaku reformasi berusaha untuk mengubah sistem tersebut melalui desain kelembagaan agar kekuasaan yang ada tidak cenderung mengarah ke sistem otoriter⁶³. Dikarenakan salah satu ciri khas dari rezim otoriter itu sendiri adalah relasi antara militer dan politik yang khas. Militer menjadi bagian terpenting dari kekuasaan itu sendiri atau bahkan menjadi penguasa utama yang dipimpin oleh rezim junta militer⁶⁴. Di masa rezim orde baru sendiri, militer menjadi kekuatan dominan dikarenakan pendekatan rezim orde baru yang berorientasi pada ‘*strong-state*’ sehingga tujuan utamanya adalah untuk menciptakan stabilitas politik⁶⁵.

Lewat pilkada secara tidak langsung, penempatan elit-elit politik dan kelompok oligark ke posisi jabatan-jabatan strategis akan lebih mudah dikarenakan besarnya koalisi partai politik di kubu pemerintahan Joko Widodo. Hal ini memiliki kemiripan dengan masa rezim orde baru yang menggunakan partai politik sebagai alat bagi pemerintahan pusat untuk menentukan kepala daerah lewat instruksi kepada anggota-anggota parlemen daerah. Salah satu contohnya adalah, upaya elit politik pusat dalam pemilihan Gubernur Riau pada tahun 1985 melalui partai Golkar memanggil dan menginstruksikan para anggota parlemen di Riau untuk memilih Mayor Jenderal Imam Munandar⁶⁶.

Maka, tanda berupa foto Tito Karnavian yang sedang menggunakan pakaian seragam kepolisian tidaklah dikarenakan keterbatasan foto Tito Karnavian dalam pakaian sipil saja. Namun, tanda tersebut memiliki hubungan paradigmatic dengan tanda-tanda yang berkaitan dengan rezim orde-baru yang dikenal sebagai rezim yang militeristik. Sehingga, peringatan atas kembalinya rezim orde-baru tidak hanya sistem pemerintahannya saja yang otoriter namun juga kekuatan militer sebagai elit politik yang berpengaruh di masa orde-baru.

F. Representasi Elit Politik sebagai Mitos

Representasi ialah bagaimana bahasa (*language*) digunakan untuk menyampaikan kan sesuatu yang berarti kepada orang lain. Makna itu sendiri direproduksi dan dipertukarkan antar anggota kelompok dalam sebuah kebudayaan (*culture*). Representasi dari elit politik sendiri dibangun melalui mitos, sehingga makna tersebut tidak begitu saja hadir secara alami namun merupakan hasil dari proses historis yang kemudian dialamiahkan.

⁶³Marijan, K. (2019). *Sistem politik Indonesia: konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru*. Kencana.

⁶⁴Ibid

⁶⁵Crouch, H. (1998). Indonesia's 'strong state'. *Weak and strong states in Asia-Pacific societies*, 93-113.

⁶⁶Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2010). Politik Lokal Di Indonesia: Dari Otokratik Ke Reformasi Politik. *Jurnal Ilmu Politik, Edisi, 21*, 2010.

Hal pertama yang perlu dibahas adalah, gerakan Gejayan Memanggil walaupun tidak mengidentifikasikan diri sebagai gerakan yang eksklusif mahasiswa, namun perlu diakui bahwa gerakan ini dipopulerkan oleh kelompok-kelompok mahasiswa atau orang-orang yang umurnya berada di antara 18-24 tahun. *Pertama*, penggunaan Instagram sebagai satu-satunya media resmi gerakan dengan nama akun @GejayanMemanggil. Berdasarkan dari laporan NapoleonCat, Pengguna Instagram di Indonesia sendiri terhitung pada bulan November 2019 berjumlah 59.840.000 pengguna, dengan kelompok pengguna terbesar berasal dari kelompok usia 18-24 tahun sebanyak 37,3% atau sekitar 23 juta pengguna⁶⁷. *Kedua*, titik-titik kumpul aksi yang memiliki kedekatan dengan mahasiswa: Gerbang utama kampus Sanata Dharma, Pertigaan Revolusi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Bundaran Universitas Gadjah Mada. Serta lokasi Gejayan sebagai lokasi utama demonstrasi. Sebagaimana titik nol kilometer Yogyakarta yang secara sosial dibangun menjadi ruang resistensi⁶⁸, lokasi Gejayan dipilih karena adanya relasi dengan demonstrasi pada tanggal 8 Mei 1998 menuntut reformasi dan diturunkannya Soeharto di lokasi yang sama, yang kemudian dikenal sebagai ‘Peristiwa Gejayan’⁶⁹. *Ketiga*, penggunaan tagar seperti #KosongkanKampus dan #KosongkanKelas yang dapat dimaknai sebagai ajakan untuk Mahasiswa mengosongkan kampus dan kelas, lalu “kuliah di jalan” alias berpartisipasi dalam demonstrasi.

Dari pemaparan di atas dapat ditemukan bahwa, gerakan ini sendiri tidaklah terlahir begitu saja dari nol. Namun, ia terbangun dari memori kolektif mahasiswa atas peristiwa Reformasi pada tahun 1998 sehingga mitos mengenai elit politik itu sendiri dibangun melalui memori kolektif tersebut.

Memori sendiri awalnya dimulai dari pikiran masing-masing individu, kemudian ia dikomunikasikan lewat bahasa untuk menciptakan hubungan sosial dan untuk menciptakan pemahaman mengenai masa-lampau kita⁷⁰. Pergerakan sosial sendiri bergantung dengan memori kolektif untuk melegitimasi identitas sebagai kontinuitas atas gerakan di masa lampau⁷¹, Gejayan Memanggil sendiri melegitimasi identitas nya sebagai kontinuitas atas gerakan Gejayan 8 Mei 1998. Tetapi, dikarenakan memori merupakan konstruksi sosial, ia

⁶⁷ Rizal, Adam. (2019). Demografi Pengguna Instagram di RI 2019, Paling Banyak Perempuan. <https://infokomputer.grid.id/read/121964120/demografi-pengguna-instagram-di-ri-2019-paling-banyak-perempuan> Diakses pada tanggal 1 Februari 2020.

⁶⁸ Nurani, Retyan. Skripsi. (2019). Mediatisasi Demonstrasi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

⁶⁹ Raditya, Iswara. (2019). Kronologi Sejarah Aksi Gejayan & Demonstrasi Mahasiswa 1998. <https://tirta.id/kronologi-sejarah-aksi-gejayan-demonstrasi-mahasiswa-1998-eizn> Diakses pada tanggal 1 Februari 2020.

⁷⁰ Seil, W. (2010). “Tito Time,” A Nation’s idealized past: Collective memory and cultural nostalgia through the memorialization of charismatic leaders.

⁷¹ Kubal, T., & Becerra, R. (2014). Social movements and collective memory. *Sociology Compass*, 8(6), 865-875.

bukanlah penggambaran statis masa lalu sehingga kesalahan-kesalahan dapat saja terjadi⁷², hal ini menciptakan celah bagi mitos-mitos tersebut terbangun.

Gagasan bahwa mahasiswa dapat bergerak bersama sebagai kesatuan unit yang kohesif, tanpa ada kepentingan pribadi demi melindungi negara menurut Aspinall merupakan mitos yang berkontribusi besar dalam memobilisasi massa dan mengakhiri rezim orde baru, bahkan ketika pada masa itu gerakan mahasiswa terbagi menjadi berbagai kelompok politik dan kelompok sosial yang memiliki tujuannya masing-masing⁷³. Untuk menyatukan berbagai elemen mahasiswa dengan kepentingan politik dan latar belakang sosial yang berbeda, maka Soeharto dikonstruksi sebagai ‘musuh bersama’ yang harus ditumbangkan⁷⁴. Setelah Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan, hilangnya ‘musuh’ bersama ini kembali memecah pergerakan mahasiswa ke kepentingan politiknya masing-masing.

Peneliti berkesimpulan bahwa kehadiran ‘musuh bersama’ ini dihadirkan kembali oleh gerakan Gejayan Memanggil untuk mengumpulkan massa aksi, dan menyatukan berbagai elemen mahasiswa. Kuatnya imaji rezim orde baru sebagai musuh bersama, membuat Aliansi Rakyat Bergerak merepresentasikan rezim Joko Widodo sebagai penerus dari rezim orde baru. Gedung parlemen di dalam unit analisis satu dan tiga merupakan gedung yang sama yang ‘diduduki’ oleh mahasiswa di tahun 1998 untuk menuntut diturunkannya Soeharto dari kursi kepresidenan, dan merupakan salah satu peristiwa historis yang dianggap salah satu puncak dari gerakan mahasiswa. Kejahatan HAM, oligarki, eksploitasi sumber daya alam, dan rezim yang memiliki unsur-unsur militeristik di rezim Joko Widodo merupakan elemen-elemen penting yang ditonjolkan di dalam unggahan akun @GejayanMemanggil yang memiliki unsur-unsur yang khas dengan rezim orde baru.

Bentuk-bentuk representasi elit politik rezim Joko Widodo dan perlawanan terhadap elit politik dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Elit Politik sebagai Kelompok ‘Alien’ di Indonesia

Pada unit analisis 1 dan unit analisis 3, ada satu tanda yang memiliki kesamaan yakni tanda berupa ilustrasi gedung dengan ilustrasi pagar barikade berduri di bagian depan ilustrasi gedung. Secara konotatif, tanda gedung di dalam kedua unit analisis tersebut merupakan penanda Gedung Kompleks Parlemen tempat bertemunya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah

⁷² Seil, W. (2010). “Tito Time,” A Nation’s idealized past: Collective memory and cultural nostalgia through the memorialization of charismatic leaders.

⁷³ Weiss, M. L., & Aspinall, E. (Eds.). (2012). *Student activism in Asia: Between protest and powerlessness*. U of Minnesota Press, 175.

⁷⁴ Arrobi, M. Z. (2020). *Islamisme ala Kaum Muda Kampus: Dinamika Aktivisme Mahasiswa Islam di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia di Era Pasca Soeharto*. UGM PRESS, 55.

melakukan pertemuan, sedangkan pagar barikade berduri merupakan pagar yang dipakai oleh aparat negara untuk memagari gedung kompleks parlemen dari massa demonstrasi.

Krell dalam bukunya *“The Devil’s Rope: A Cultural History of Barbed Wire”* Pagar barikade berduri (*barbed wire*) berpendapat bahwa pagar berduri sebagai sebuah objek bukanlah sekadar pembatas kepemilikan properti, zona perang, perbatasan, namun juga memiliki sejarah yang dikonstruksi melalui gambar, teks, media, dan budaya populer⁷⁵. Sehingga, untuk mengetahui bagaimana makna pagar berduri dikonstruksi di Indonesia maka perlu dianalisis konteks dari pagar berduri itu sendiri yang dapat ditemui lewat hubungannya dengan tanda gedung kompleks parlemen.

Salah satu karya yang menghubungkan antara demonstrasi dan pagar berduri ialah puisi Taufik Ismail pada tahun 1966 berjudul “Harmoni”. Pagar berduri dalam puisi tersebut menyimbolkan pemerintahan orde lama yang tirani dan represif terhadap massa aksi demonstrasi⁷⁶. Begitu juga dengan puisi Sandy Tyas berjudul “Hati Nurani” dengan pagar berduri sebagai simbol aktivitas militer yang melindungi penguasa yang berada “di balik barikade dan pagar berduri”⁷⁷. Dalam bentuk fotografi jurnalistik, pagar berduri juga menjadi objek yang dipotret oleh wartawan untuk menggambarkan situasi yang genting. Misalnya, foto karya Rully Kusuma dalam “Dokumentasi 20 Tahun Peristiwa Reformasi” terbitan Aliansi Jurnalistik Independen yang memotret pagar barikade kawat di daerah Gambir Jakarta pada tanggal 20 Mei 1998. Maka, pagar berduri dapat dilihat konteksnya yang telah lekat dengan tindakan represif aparat pemerintah untuk menekan aksi demonstrasi.

Selain itu, pagar berduri dengan konteksnya bersama gedung kompleks parlemen dapat dilihat sebagai bentuk “mengamankan” orang-orang yang berada di dalam gedung kompleks parlemen, elit-elit politik yang menjabat sebagai anggota parlemen. Gedung kompleks parlemen sendiri memiliki makna tersendiri dibandingkan gedung pemerintahan lain, seperti Istana Negara, atau gedung Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan gedung kompleks parlemen punya sejarah tersendiri yakni peristiwa Pendudukan Gedung MPR/DPR pada tahun 1998 oleh massa demonstrasi, sebagai bentuk tuntutan dari massa demonstrasi untuk diadakannya Sidang Istimewa MPR untuk melengserkan Soeharto dari jabatan kepresidenan⁷⁸.

⁷⁵Krell, A. (2002). *The devil's rope: a cultural history of barbed wire*. Reaktion Books.

⁷⁶Widada, D. M. (2017). Analisis Kumpulan Puisi Tirani Karya Taufiq Ismail Dalam Perspektif Politik Kekuasaan Orde Lama. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 3(2), 185-203.

⁷⁷Syafrial, S. (2011). Semangat Patriotis dalam Puisi Angkatan 66. *Lentera: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Budaya dan Sosial*, 2(04), 94-107.

⁷⁸Nusantara, A. A., Putra, R. M. S., & Sudarmanto, J. B. (1998). *Aksi mahasiswa menuju gerbang reformasi*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tindakan represif tersebut sebagaimana yang telah dibahas dalam pembahasan unit analisis 1, merupakan bentuk untuk mempertahankan kekuasaan dari elit-elit politik dikarenakan ketidakmampuannya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat yang diperintah lewat alat-alat retorika. Namun, di satu sisi sebagaimana pagar kawat di tempat awal penggunaannya di Amerika Serikat mendapat sebutan “*the devil’s rope*” oleh suku-suku pribumi Amerika dikarenakan penggunaannya untuk penguasaan lahan oleh masyarakat kulit putih⁷⁹ sehingga membuat batasan kultural antara masyarakat kulit putih dengan suku pribumi Amerika. Pagar kawat dan gedung kompleks parlemen dalam unit analisis 1 dan unit analisis 3 menjadi simbol pemisahan antara penguasa dan yang dikuasai.

Namun, terdapat perbedaan antara rezim orde baru dengan rezim pasca-orde baru. Ketika rezim orde baru menyatakan diri berada “di atas politik” dan hanya peduli pada manajemen teknokrat untuk pembangunan negara, sehingga politik pada masa orde-baru menurut Hadiz dan Robinson:

“... ‘*politics*’ was confined within an apparatus of state-orchestrated elections, state-sponsored political parties and a tame parliament. Outside these, citizens were scooped into mass-based organisations that were effectively the cheerleaders of the state.”⁸⁰

Joko Widodo dan Prabowo Subianto, menurut Aspinall dalam konteks pemilu 2014 sama-sama mengklaim sebagai ‘*political outsiders*’ atau orang yang berada di luar lingkaran politik Indonesia yang masih mengakar pada orde-baru⁸¹. Pemilu 2014 dapat dipandang sebagai kebangkitan dari politik populisme di Indonesia mengingat bagaimana Joko Widodo dan Prabowo Subianto menggunakan retorika nasionalisme dan keadilan sosial, sembari mengkritisi politisi Indonesia⁸². Jika kita berfokus pada image Joko Widodo sebagai seorang pengusaha dari Kota Solo yang tidak memiliki mesin partai sendiri, maka Joko Widodo dapat dipandang sebagai seseorang yang mempunyai latar belakang yang biasa saja dibanding politisi setingkat Jakarta ataupun pengusaha skala nasional⁸³. Joko Widodo lebih tepat disebut sebagai seorang elit lokal yang mendapat keuntungan dari desentralisasi kekuasaan pasca orde-baru, dibanding sebagai penerus dari orde-baru. Dibanding kelompok yang alien,

⁷⁹Krell, A. (2002). *The devil's rope: a cultural history of barbed wire*. Reaktion Books.

⁸⁰ Hadiz, V. R., & Robison, R. (2017). Competing populisms in post-authoritarian Indonesia. *International Political Science Review*, 38(4), 492.

⁸¹ Aspinall, E. (2015). Oligarchic populism: Prabowo Subianto's challenge to Indonesian democracy. *Indonesia*, (99), 15.

⁸² Ibid, 18.

⁸³ Okamoto, M. (2009). Populism under Decentralization in post-Suharto Indonesia. *Populism in Asia*, 144-164 dalam Hadiz, V. R., & Robison, R. (2017). Competing populisms in post-authoritarian Indonesia. *International Political Science Review*, 38(4), 494.

politik pada era Joko Widodo lebih tepat untuk disebut sebagai era kerja sama antara populisme dan oligarki.

2. Elit Politik Pasca-Reformasi Sebagai Peranjutan dari Elit Politik Orde Baru

Tagar #ReformasiDiKorupsi menjadi salah satu tagar utama yang mulai digunakan oleh akun @GejayanMemanggil sejak setelah Aksi Gejayan Memanggil 1 dilakukan--tagar ini awalnya digunakan oleh gerakan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 September 2019 sebagai respon dari tagar #GejayanMemanggil⁸⁴. Tagar #ReformasiDiKorupsi sendiri ditulis pada *caption* unggahan unit analisis 2 dan 4 yang diunggah pada waktu berdekatan; unit analisis 2 diunggah pada tanggal 29 September 2019 pukul 09:03 WIB dan unit analisis 4 diunggah pada tanggal 29 September 2019 pukul 09:17 WIB sebagai ajakan untuk Aksi Gejayan Memanggil 2 yang dilaksanakan esok harinya pada tanggal 30 September 2019.

Kata “Reformasi” dalam tagar tersebut merujuk kepada tuntutan aksi massa pada tahun 1998 di Indonesia untuk mereformasi pemerintahan rezim orde baru yang otoriter, terpusat, dan militeristik menuju pemerintahan yang demokratis⁸⁵. Makna dari kata “Reformasi” bergeser dari makna kamus: Perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara⁸⁶ menjadi sebutan untuk era setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada bulan Mei 1998. Sedangkan, kata “dikorupsi” konteksnya merujuk kepada penolakan dari RUU KPK (Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dianggap melemahkan KPK yang berimbas pada berkembangnya praktik korupsi di Indonesia. Namun, kalimat “Reformasi Dikorupsi” dapat dimaknai sebagai “Pengkhianatan terhadap mandat Reformasi.” Reformasi dalam kalimat tersebut dipandang sebagai sebuah era, maka yang bukan “Reformasi” adalah “Orde Baru” dan pengkhianatan terhadap mandat reformasi adalah “Kembalinya orde baru” sebagaimana tanda “WASPADAI KEMBALINYA ORDE BARU” pada unit analisis 5.

Seperti yang telah dipaparkan di masing-masing pembahasan pada unit analisis 2, 4, dan 5. Ciri khas dari rezim orde baru ialah rezim yang melakukan dan menyembunyikan kejahatan HAM, merusak lingkungan dan melindungi pelaku perusak lingkungan, serta corak pemerintahan yang cenderung militeristik.

⁸⁴ The Jakarta Post. (2019). #ReformCorrupted. <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/09/25/reformcorrupted-1569384427.html> Diakses pada tanggal 2 Februari 2020.

⁸⁵ Manning, C., & Van Diemen, P. (Eds.). (2000). *Indonesia in transition: social dimensions of the reformasi and the economic crisis* (Vol. 6). Zed Books.

⁸⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/reformasi> Diakses pada tanggal 2 Februari 2020.

Tuntutan untuk diadilinya pelaku HAM yang di antaranya ialah orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan Joko Widodo yang di antaranya ialah: Hendropriyono yang kerap disebut terlibat dalam pembunuhan Munir, pendudukan Timor timur, dan pembantaian Talangsari⁸⁷, Wiranto yang kerap disebut terlibat dalam peristiwa penyerangan markas Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 27 Juli 1996, Tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II, penculikan serta penghilangan aktivis pro-demokrasi tahun 1997-1997, dan Biak Berdarah⁸⁸. Keseluruhan peristiwa yang dianggap melibatkan kedua orang tersebut terjadi di era orde baru. Sedangkan elit-elit politik sipil orde baru yang ikut di dalam lingkaran kekuasaan Joko Widodo adalah Surya Paloh, Abu Rizal Bakrie, Hary Tanoesoedibjo, dan lain-lain. Kebanyakan dari mereka sendiri berasal dari kalangan pengusaha, yang telah menjalankan bisnisnya sejak orde baru lalu berpartisipasi lewat penguasaan partai-partai politik⁸⁹.

3. Elit Politik dan Oligark Perusak Lingkungan

Latar belakang dari unit analisis 4 adalah naiknya kritik publik terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2019, khususnya yang berpusat di daerah Kalimantan dan Sumatera. Diperkirakan, terdapat 900 ribu hektar⁹⁰. Kebakaran tersebut sendiri diduga bukanlah dikarenakan aktivitas pembukaan lahan dari warga lokal, namun dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk membuka lahan baru kelapa sawit⁹¹. Penggunaan kata “elit-elit” dalam unit analisis 4, menunjukkan bahwa kalimat tersebut tidak merujuk kepada pembakar lahan biasa--masyarakat biasa yang membuka lahan untuk kepentingan pertanian. Namun, merujuk kepada oligark yang mengeksploitasi alam secara berlebihan.

⁸⁷ Ariefana, Pebriansyah. (2014). Allan Nairn: Hendropriyono Bertanggungjawab Atas Pembunuhan Munir. https://kbr.id/berita/10-2014/allan_nairn_hendropriyono_bertanggungjawab_atas_pembunuhan_munir/30065.html Diakses pada tanggal 2 Februari 2020.

⁸⁸ Movanita, Ambaranie. (2016). Kontras: Wiranto Ada di Deret Terdepan Atas Sejumlah Pelanggaran HAM. <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/27/14565681/kontras.wiranto.ada.di.deret.terdepan.atas.sejumlah.pelanggaran.ham?page=all> Diakses pada tanggal 2 Februari 2020.

⁸⁹ Poczter, S., & Pepinsky, T. B. (2016). Authoritarian legacies in post–New Order Indonesia: Evidence from a new dataset. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(1), 77-100.

⁹⁰ Nugraha, Indra. (2019). Kebakaran Hutan dan Lahan Sampai September 2019 Hampir 900 Ribu Hektar. <https://www.mongabay.co.id/2019/10/22/kebakaran-hutan-dan-lahan-sampai-september-2019-hampir-900-ribu-hektar/> Diakses pada tanggal 6 Februari 2020.

⁹¹ Putri, Aditya. (2019). Pembakaran Hutan: Elite yang Untung Peladang yang Disalahkan. <https://tirto.id/pembakaran-hutan-elite-yang-untung-peladang-yang-disalahkan-eikd> Diakses pada tanggal 6 Februari 2020.

Sistem Oligarki yang tumbuh di orde baru, lalu melakukan reorganisasi pasca-reformasi untuk menyesuaikan dengan sistem yang baru: desentralisasi kekuasaan⁹². Sehingga, ketika masa orde baru, oligark-oligark tersebut berkerja-sama dengan “Raja”--Soeharto. Pada era pasca-reformasi, oligark-oligark mengubah sistemnya sehingga mereka kini berkerja-sama dengan “Raja-raja kecil” atau dalam artian kepala-kepala daerah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan izin, dan melakukan deregulasi untuk memudahkan oligark-oligark mengeruk keuntungan lewat eksploitasi alam yang berlebihan.

4. Perlawanan Terhadap Elit Politik Melalui Pernyataan “Mosi Tidak Percaya”

Istilah ‘Mosi Tidak Percaya’ sendiri mengalami pergeseran dari makna aslinya, bentuk pernyataan tidak percaya anggota parlemen kepada kepala pemerintahan di negara-negara yang memiliki sistem parlementer--Indonesia sendiri menerapkan sistem presidensial sehingga presiden tidak bertanggung jawab terhadap parlemen⁹³, ke pernyataan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Istilah ‘Mosi Tidak Percaya’ sendiri menjadi *anthem* yang khas di aksi-aksi demonstrasi era rezim Joko Widodo sejak dipopulerkan melalui lagu band Efek Rumah Kaca dengan judul yang sama “Mosi Tidak Percaya.” Lagu dan perlawanan sepanjang sejarah Indonesia sendiri bukanlah sesuatu yang baru, misalnya pada masa orde baru dengan lagu “Bongkar” dan “Wakil Rakyat” dari Iwan Fals⁹⁴

Lantas mengapa lagu “Mosi Tidak Percaya” kemudian dipilih, dibandingkan lagu-lagu yang juga sama relevannya dengan lagu tersebut, seperti “Tantang Tirani” karya Homicide⁹⁵, “Sunset di Tanah Anarki” karya Superman Is Dead⁹⁶, atau “Negri Ngeri” karya Marjinal⁹⁷? *Pertama*, Efek Rumah Kaca selain menjadi band musik yang populer saat ini, ia juga telah lekat dengan aksi-aksi perlawanan seperti, ketika band Efek Rumah Kaca,

⁹²Hadiz, V., & Robison, R. (2005). Neo-liberal reforms and illiberal consolidations: The Indonesian paradox. *The Journal of Development Studies*, 41(2), 220-241.

⁹³Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.

⁹⁴ Taufiqurrahman, Muhammad. (2019). #MosiTidakPercaya How an indie song became the anthem of a generation. <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/09/29/mositidakpercaya-how-an-obscure-indie-song-became-the-anthem-of-a-generation.html> Diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

⁹⁵Aziz, M. F. (2014). *Representasi perlawanan sipil dalam lirik lagu tantang tirani: analisis semiotika charles sanders peirce* (Doctoral dissertation, Universitas Multimedia Nusantara).

⁹⁶Eliezer, H. (2017). Perlawanan dalam lirik lagu di album Sunset di Tanah Anarki karya Superman Is Dead: kajian semiotik Riffaterre.

⁹⁷Permana, M. R. (2015). *Representasi kritik sosial mengenai kondisi paradoks di indonesia dalam lirik lagu " negri ngeri" oleh band punk marjinal (analisis semiotika ferdinand de saussure)* (Doctoral dissertation, Universitas Multimedia Nusantara).

misalnya ikut serta dalam aksi Kamisan di Jakarta⁹⁸ dan saat menyanyikan lagu “Mosi Tidak Percaya” dalam memperingati Hari Anti Korupsi di Gedung DPR/MPR⁹⁹. *Kedua*, pengulangan kalimat dalam lirik yang mudah diingat, sehingga dapat digunakan sebagai *chant* dalam aksi demonstrasi. Kalimat “mosi tidak percaya” sendiri juga merupakan kalimat yang mudah diingat, namun sarat atas makna yang politis di dalamnya. *Ketiga*, sebagaimana yang ditulis Denisoff tentang bagaimana sebuah lagu dapat menjadi “propaganda” lewat fungsinya untuk (1) membangkitkan dukungan dari luar untuk gerakan tersebut, (2) memperkuat sistem nilai individu yang merupakan pendukung priori dari gerakan sosial/ideologi, (3) menciptakan rasa solidaritas dan kohesi dalam gerakan, (4) merekrut individu ke dalam gerakan, (5) mengundang solusi terhadap suatu fenomena sosial, (6) mengarahkan perhatian terhadap masalah atau ketidakpuasan dalam terminologi yang mengandung emosi¹⁰⁰. Lagu “Mosi Tidak Percaya” secara lirik, mampu membawa keenam fungsi tersebut, (1) fungsi membangkitkan dukungan dari luar dengan menyindir anggota parlemen--kata “kamu” dalam lagu ini merujuk kepada anggota parlemen di Indonesia, (2) memperkuat sistem nilai individu dengan bait-bait lirik seperti “ini masalah kuasa, alibimu berharga”, (3) menciptakan rasa solidaritas dan kohesi dalam gerakan melalui penggunaan kata “Kami” di dalam lirik, (4) merekrut individu ke dalam gerakan melalui kritik terhadap anggota DPR lewat lirik-lirik yang mengandung emosi dan kekesalan seperti dalam lirik “Jelas kalau kami marah, Kamu dipercaya susah,” (5) mengundang solusi terhadap fenomena sosial--anggota DPR yang menyelewengkan kekuasaan, dengan solusi untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap anggota DPR, (6) mengarahkan perhatian terhadap masalah atau ketidakpuasan, masalah yang disebut dalam lagu ini ialah penyelewengan kekuasaan oleh anggota DPR, dan ketidakpuasan “Kami” terhadap anggota DPR lewat terminologi yang mengandung emosi seperti dalam lirik “Ini Mosi Tidak Percaya, jangan anggap kami tak berdaya.

Kesimpulannya, secara konotatif bentuk perlawanan utama adalah dengan bersikap ‘tidak percaya’ dengan pemerintahan. Namun, di satu sisi perlawanan tersebut berakhir di posisi tidak percaya saja, tanpa memberikan alternatif sistem yang baru. Hal ini terjadi dikarenakan kuatnya label *heroism* di gerakan mahasiswa seperti: *agent of change, iron stock, & social control*¹⁰¹. Labelisasi yang heroik serta konstruksi aktivisme yang tidak

⁹⁸ Gabrillin, Abba. (2017). Efek Rumah Kaca Ikut Peringati Aksi Kamisan ke-500 di Depan Istana. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/27/10533231/efek-rumah-kaca-ikut-peringati-aksi-kamisan-ke-500-di-depan-istana> Diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

⁹⁹ Cahya, Kahfi. (2015). “Mosi Tidak Percaya” untuk DPR dari Efek Rumah Kaca. <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/08/16165231/.Mosi.Tidak.Percaya.untuk.DPR.dari.Efek.Rumah.Kaca> Diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

¹⁰⁰ Denisoff, R. S. (1968). Protest Movements: Class Consciousness and the Piopaganda Song. *The Sociological Quarterly*, 9(2), 228-247.

¹⁰¹ Novanto, Arif. (2016). Pergulatan Gerakan Mahasiswa dan Kritik Terhadap Gerakan Moral. *Indonesia Bergerak 2, Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia*, 195.

memiliki kepentingan kekuasaan merupakan ciri dari gerakan moral yang lahir dari rahim orde baru¹⁰². Gerakan moral sendiri berpondasi pada karya Julian Benda yang berjudul “*La Trahison des Clercs.*” Benda berpendapat bahwa cendekiawan yang terlibat dalam perpolitikan merupakan pengkhiantan intelektual, dan cendekiawan yang ideal adalah seorang moralis yang kegiatannya merupakan perlawanan terhadap realisme massa¹⁰³. Karya Benda kemudian dipopulerkan dan dijadikan pondasi gagasan gerakan moral di Indonesia dari tulisan-tulisan Soe Hok Gie dan Arief Budiman¹⁰⁴. Arif Novanto menyebut gerakan moral sebagai gerakan regresif, dan memisahkannya dengan ‘gerakan politik progresi,’ dengan perbedaan: *Pertama*, gerakan moral menolak membangun aliansi dengan gerakan rakyat atau gerakan massa demi kemurnian gerakan. *Kedua*, gerakan moral mengklaim tidak adanya ambisi pribadi, ataupun meminta sumbangsih dari perjuangannya. *Ketiga*, gerakan moral melakukan gerakan berupa tuntutan koreksi dan peringatan dikarenakan radikalisme gerakan dapat mengancam stabilitas. *Keempat*, gerakan moral mengkonstruksi dirinya dengan label heroisme seperti *agent of change*, *iron stock*, dan seterusnya¹⁰⁵.

Berdasarkan pembahasan peneliti mengenai gerakan Gejayan Memanggil dan Aliansi Rakyat Bergerak di bab 1 dan bab 2, terdapat usaha dari kelompok ini untuk melepaskan diri dari label gerakan moral yang populer di kalangan mahasiswa sejak era angkatan '66, seperti: membentuk aliansi dengan kelompok-kelompok lain seperti kelompok buruh dan kelompok tani, membuat logo yang melambangkan egaliter dan *equality*, dan membentuk aliansi untuk keberlanjutan gerakan. Tetapi, peneliti berpendapat gerakan Gejayan Memanggil cenderung ke gerakan moral dikarenakan dua hal: *Pertama*, esensi gerakan yang sekadar tuntutan seperti diadilinya pelanggaran HAM, diadilinya perusak lingkungan, dihilangkannya oligarki di sistem pemerintahan, dan seterusnya, sehingga gerakan seperti yang dikatakan Novanto “... tidak bersifat menekan tapi lebih menuntut dan memperingatkan atau bersifat *top-down*. Kedaulatan dilihat tidak berada di tangan rakyat dan mereka menunggu kebaikan hati pemerintah¹⁰⁶. *Kedua*, kuatnya diskursus gerakan moral sebagai identitas mahasiswa Indonesia¹⁰⁷, sehingga gerakan berpotensi hanya bersifat spontanitas, dan membuat gerakan menjadi tumpul. Gejayan Memanggil 1 dan 2 muncul karena adanya perasaan negara sedang dalam masa genting dan menuntut mahasiswa sebagai

¹⁰² Ibid, 196.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Maxwell, J. R. (1997). Soe Hok-Gie: a biography of a young Indonesian intellectual dalam Aspinall, E. (2012). Indonesia: moral force politics and the struggle against Authoritarianism. *Student activism in Asia: Between protest and powerlessness*, 166.

¹⁰⁵ Novanto, Arif. (2016). Pergulatan Gerakan Mahasiswa dan Kritik Terhadap Gerakan Moral. *Indonesia Bergerak 2, Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia*, 195.

¹⁰⁶ Ibid, 199.

¹⁰⁷ Jackson, E. Y. (2005). "Warring Words": Students and the state in New Order Indonesia, 1966-1998.

'kobi' atau 'resi' untuk 'turun gunung.' Ketika masa-masa genting itu telah usai, atau redup, gerakan akan redup dengan sendirinya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang representasi elit politik yang muncul dalam unggahan akun Instagram @GejayanMemanggil dapat disimpulkan sebagai berikut:

Gerakan #GejayanMemanggil terbangun dari memori kolektif mahasiswa atas peristiwa Reformasi pada tahun 1998 sehingga mitos mengenai elit politik itu sendiri dibangun melalui memori kolektif tersebut.

Gagasan bahwa mahasiswa dapat bergerak bersama sebagai kesatuan unit yang kohesif, tanpa ada kepentingan pribadi demi melindungi negara merupakan mitos yang berkontribusi besar dalam memobilisasi massa dan mengakhiri rezim orde baru. Untuk menyatukan berbagai elemen mahasiswa dengan kepentingan politik dan latar belakang sosial yang berbeda, maka Soeharto dikonstruksi sebagai ‘musuh bersama’ yang harus ditumbangkan. Setelah Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan, hilangnya ‘musuh’ bersama ini kembali memecah pergerakan mahasiswa ke kepentingan politiknya masing-masing.

Peneliti berkesimpulan bahwa kehadiran ‘musuh bersama’ ini dihadirkan kembali oleh gerakan Gejayan Memanggil untuk mengumpulkan massa aksi, dan menyatukan berbagai elemen mahasiswa. Kuatnya imaji rezim orde baru sebagai musuh bersama, membuat Aliansi Rakyat Bergerak merepresentasikan rezim Joko Widodo sebagai penerus dari rezim orde baru. Gedung parlemen di dalam unit analisis satu dan tiga merupakan gedung yang sama yang ‘diduduki’ oleh mahasiswa di tahun 1998 untuk menuntut diturunkannya Soeharto dari kursi kepresidenan, dan merupakan salah satu peristiwa historis yang dianggap salah satu puncak dari gerakan mahasiswa. Kejahatan HAM, oligarki, eksploitasi sumber daya alam, dan rezim yang memiliki unsur-unsur militeristik di rezim Joko Widodo merupakan elemen-elemen penting yang ditonjolkan di dalam unggahan akun @GejayanMemanggil yang memiliki unsur-unsur yang khas dengan rezim orde baru.

Kesimpulan dari poin-poin di atas menunjukkan bahwa representasi elit politik dalam unggahan akun Instagram @GejayanMemanggil ialah kelompok yang

Secara konteks, beberapa poin di atas menunjukkan bahwa representasi elit politik dalam unggahan akun Instagram @GejayanMemanggil adalah elit politik yang merupakan perpanjangan dari orde baru, yang tidak menjalankan mandat dari peristiwa reformasi pada tahun 1998. Hal-hal tersebut kemudian diperlihatkan lewat pemerintahan yang melakukan tindakan represif terhadap masyarakat, masuknya petinggi-petinggi militer dan oligark orde baru ke dalam sistem pemerintahan, serta penerapan sistem ekonomi neoliberalisme yang menyuburkan praktik monopoli terhadap tanah dan lahan.

Perlawanan yang dilakukan pun membawa ideologi gerakan mahasiswa angkatan 98, yang terlihat lewat penolakan terhadap elit politik militer, penuntasan kasus HAM, penolakan sistem ekonomi neoliberalisme, dan penuntasan reformasi pemerintahan Indonesia. Kesamaan ideologi ini berasal dari hubungan historis antara gerakan Gejayan Memanggil dengan peristiwa Gejayan yang terjadi pada tanggal 8 Mei 1998, titik-titik kumpul di Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Universitas Sanata Dharma, serta target audiens dengan demografik umur 18-24 tahun.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa keterbatasan yang peneliti alami, yaitu:

1. Terbatasnya literatur dan referensi pendukung penelitian, khususnya referensi mengenai mitos dalam poster-poster gerakan *resistance*.
2. Terbatasnya literatur dan referensi mengenai representasi elit politik di Indonesia dan perlawanan terhadap elit politik di Indonesia.

C. Saran

1. Saran Teoritis

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, peneliti menyarankan penggunaan teoritis lainnya dalam kajian semiotika, khususnya yang menggunakan metode semiotika Roland Barthes. Terdapat banyak teks-teks dengan ideologi yang dapat dibongkar, khususnya dalam teks-teks budaya populer di Indonesia.

Peneliti juga menyarankan untuk melakukan penelitian terhadap teks-teks pergerakan di Indonesia dengan mitos-mitos yang lain, seperti bagaimana mitos pergerakan mahasiswa di Indonesia, atau bagaimana mitos “wong cilik” di Indonesia.

2. Saran Praktis

Selain memberikan saran dalam aspek teoritis, peneliti juga menyarankan saran praktis yakni untuk berpikir kritis dalam melihat teks-teks khususnya teks-teks ajakan demonstrasi. Dalam melakukan perlawanan terhadap kekuasaan, tidak hanya memerlukan massa yang banyak saja. Hal tersebut dikarenakan, massa yang banyak tanpa pengetahuan yang mendalam terhadap isu yang dibawa, akan membuat pergerakan perlawanan tersebut hanya dijadikan ajang untuk “karena aku mahasiswa” saja.



Daftar Pustaka

Buku

- Budiman, K. (2011). *Semiotika visual: konsep, isu, dan problem ikonisitas*. Jalasutra.
- Hall, S. (1997). The work of representation. *Representation: Cultural representations and signifying practices*, 2, 13-74.
- Krell, A. (2002). *The devil's rope: a cultural history of barbed wire*. Reaktion Books.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Teori komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Loader, B. D. (Ed.). (2007). *Young citizens in the digital age: Political engagement, young people and new media*. Routledge.
- Ludes, P. (2005). Visual Hegemonies: An Outline= Volume 1 of The World Language of Key Visuals: Computer Sciences, Humanities. *Social Sciences. LIT, Muenster*.
- Manning, C., & Van Diemen, P. (Eds.). (2000). *Indonesia in transition: social dimensions of the reformasi and the economic crisis* (Vol. 6). Zed Books.
- Marijan, K. (2019). *Sistem politik Indonesia: konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru*. Kencana.
- Mietzner, M. (2006). The politics of military reform in post-Suharto Indonesia: Elite conflict, nationalism, and institutional resistance.
- Nusantara, A. A., Putra, R. M. S., & Sudarmanto, J. B. (1998). *Aksi mahasiswa menuju gerbang reformasi*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- R, H. Y. (2013). *Presidensialisme Setengah Hati*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rulli Nasrullah, M. S. (2016). *Teori dan riset media siber (cybermedia)*. Kencana.
- Scott, J. C. (2008). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.
- Seil, W. (2010). "Tito Time," A Nation's idealized past: Collective memory and cultural nostalgia through the memorialization of charismatic leaders.
- Simanjuntak, P. N. H. (2003). *Kabinet-kabinet Republik Indonesia: dari awal kemerdekaan sampai reformasi*. Djambatan.
- Smith, P., & Riley, A. (2011). *Cultural theory: An introduction*. John Wiley & Sons.

Jurnal

- Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2010). Politik Lokal Di Indonesia: Dari Otokratik Ke Reformasi Politik. *Jurnal Ilmu Politik, Edisi, 21*, 2010.
- Albertus, F., & Zalukhu, Y. (2019). Dampak Dan Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Di Kalimantan Timur. *Legalitas*, 4(1), 42-56.
- Aspinall, E., & Fealy, G. (Eds.). (2010). *Soeharto's new order and its legacy: essays in honour of Harold Crouch* (Vol. 2). ANU E Press.

- Benda, H. J. (1966). The pattern of administrative reforms in the closing years of Dutch rule in Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 25(4), 589-605.
- Cahyono, E. (2017). "Gemah Ripah Loh Jinawi, Untuk Siapa?": Makin Jauhnya Cita-cita Kedaulatan Agraria. *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, 1(1), 65-79.
- Charin, R. O. P., & Hidayat, A. (2019). The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to Maintain Their Existence in Customary Forest Resources Battle. *Society*, 7(1), 21-36.
- Crouch, H. (1998). Indonesia's 'strong state. *Weak and strong states in Asia-Pacific societies*, 93-113.
- Denisoff, R. S. (1968). Protest Movements: Class Consciousness and the Piopaganda Song. *The Sociological Quarterly*, 9(2), 228-247.
- Devenish, G. (2015). 'A comedy of errors': parliament's conduct in relation to the tabling of a motion of no confidence in the President: case notes. *Southern African Public Law*, 30(1), 290-301.
- Feith, H. (1980). Repressive-developmental regimes in Asia: Old strengths, new vulnerabilities. *Prisma*, 19(1), 39-55.
- Hadiz, V., & Robison, R. (2005). Neo-liberal reforms and illiberal consolidations: The Indonesian paradox. *The Journal of Development Studies*, 41(2), 220-241.
- Halili, H. (2016). Politik penegakan hak asasi manusia pada masa transisi di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2), 199-208.
- Hidayat, D. (2002). Metodologi Penelitian dalam Sebuah "Multi-Paradigm Science". *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 3(2), 197-220.
- Ilmar, A. (2017). Pembangunan dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru: Dari Teknokratis ke Populis?. *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, 3(1).
- Korpi, W. (2006). The power resources model. *The welfare state reader*, 76-87.
- Kubal, T., & Becerra, R. (2014). Social movements and collective memory. *Sociology Compass*, 8(6), 865-875.
- Lim, M. (2003). From war-net to net-war: The Internet and resistance identities in Indonesia. *The International Information & Library Review*, 35(2-4), 233-248.
- Lim, M. (2006). Cyber-urban activism and the political change in Indonesia. *Eastbound*, 1(1), 1-19.
- Lim, M. (2017). Klik yang tak memantik: aktivisme media sosial di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 35-50.
- Loader, B. D. (2008). Social movements and new media. *Sociology Compass*, 2(6), 1920-1933.
- Martinez-Bravo, M., Mukherjee, P., & Stegmann, A. (2017). The non-democratic roots of elite capture: Evidence from Soeharto mayors in Indonesia. *Econometrica*, 85(6), 1991-2010.
- Mayrudin, Y. M. A. (2017). Tirani DPR Atas Negara: Menggugat Kuasa DPR RI, Menuju Efektifitas Pemerintahan. *Journal of Governance*, 1(1).
- McVey, R. (1982). The Beamtenstaat in Indonesia. *Interpreting Indonesian politics: Thirteen contributions to the debate*, 84-91.

- Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara “Party-ID” dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 17.
- Mukhongo, L. (2014). Negotiating the new media platforms: Youth and political images in Kenya. *tripleC*, 12(1), 328-341.
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.
- Pariawan, K. J., Sila, I. N., & Hum, M. (2019). Analisis Semiotika Poster Aksi Bali Tolak Reklamasi Karya Nobodycorp. *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha*, 9(2), 77-86.
- Poczter, S., & Pepinsky, T. B. (2016). Authoritarian legacies in post–New Order Indonesia: Evidence from a new dataset. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(1), 77-100.
- Pranadji, T. (2017). Keserakahan, Kemiskinan, dan Kerusakan Lingkungan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 3(4), 313-325.
- Randang, I. I. E. (2018). Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut Kuhap. *LEX CRIMEN*, 7(3).
- Robinson, R., & Hadiz, V. R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganizing of Power in Indonesia, in Indonesia Journal, Special Edicion, Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics. *Cornell Southeast Asia program Publications*, (96), 35-57.
- Robinson, R., & Hadiz, V. R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganizing of Power in Indonesia, in Indonesia Journal, Special Edition, Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics. *Cornell Southeast Asia program Publications*, (96), 35-57.
- Syafriah, S. (2011). Semangat Patriotis dalam Puisi Angkatan 66. *Lentera: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Budaya dan Sosial*, 2(04), 94-107.
- Vera, N. (2014). Semiotika dalam riset komunikasi. *Bogor: Ghalia Indonesia*, 8, 30.
- Widada, D. M. (2017). Analisis Kumpulan Puisi Tirani Karya Taufiq Ismail Dalam Perspektif Politik Kekuasaan Orde Lama. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 3(2), 185-203.
- Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, (96), 11-33.
- Zuni Susilowati, E. N. I. K. (2019). Resistensi Perempuan Dalam Kumpulan Cerita Tandak Karya Royyan Julian (Teori Resistensi-James C. Scott). *Bapala*, 5(2).

Skripsi

- Aziz, M. F. (2014). *Representasi perlawanan sipil dalam lirik lagu tantang tirani: analisis semiotika charles sanders peirce* (Doctoral dissertation, Universitas Multimedia Nusantara).
- Eliezer, H. (2017). *Perlawanan dalam lirik lagu di album Sunset di Tanah Anarki karya Superman Is Dead: kajian semiotik Riffaterre*. Skripsi. Universitas Negeri Jakarta.
- Faudhiah, D. (2019). *Oligarki Politik: Pertemuan Kepentingan Bisnis dan Kepentingan Politik Di Nagan Raya* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

- Kurniawan, A. W. (2018). *Gerakan petani dalam pro kontra pembangunan pabrik semen di Desa Brati Kecamatan Kayen KABUPATEN Pati* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Nurani, Retyan. Skripsi. (2019). *Mediatisasi Demonstrasi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Permana, M. R. (2015). *Representasi kritik sosial mengenai kondisi paradoks di indonesia dalam lirik lagu "negeri negeri" oleh band punk marjinal (analisis semiotika ferdinand de saussure)* (Doctoral dissertation, Universitas Multimedia Nusantara).
- Pratama, H. M. S. (2016). *Kajian Poster Anti Tank Project Tahun 2008-2015* (Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Yogyakarta).
- Ramalia, V., Soedarsoni, D. K., & Esfandari, D. A. (2016). Makna Poster Di Tanah Kami Nyawa Tak Semahal Tambang (analisis Semiotika Charles Sanders Peirce Pada Poster Kasus Pembunuhan Salim Kancil). *eProceedings of Management*, 3(3).
- Rizal, Bayu. (2018). *Poster sebagai Sarana Ekspresi Terhadap Isu Sosial dan Politik (Analisis Semiotika Akun Instagram @_asoy dalam Mengekspresikan Keadaan Sosial Politik Indonesia Melalui Media Poster di Ruang Publik Instagram*. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

Internet

- Ariefana, Pebriansyah. (2014). Allan Nairn: Hendropriyono Bertanggungjawab Atas Pembunuhan Munir. https://kbr.id/berita/10-2014/allan_nairn_hendropriyono_bertanggungjawab_atas_pembunuhan_munir/30065.html Diakses pada tanggal 2 Februari 2020.
- Arumingtyas, Lusia. (2019). "Kebakaran Berulang di Perusahaan Sawit dan Bubur Kertas Masih Minim Sanksi" <https://www.mongabay.co.id/2019/09/28/kebakaran-berulang-di-perusahaan-sawit-dan-bubur-kertas-masih-minim-sanksi/> diakses pada tanggal 22 Januari 2020.
- Cahya, Kahfi. (2015). "Mosi Tidak Percaya" untuk DPR dari Efek Rumah Kaca. <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/08/16165231/.Mosi.Tidak.Percaya.untuk.DPR.dari.Efek.Rumah.Kaca> Diakses pada tanggal 5 Februari 2020.
- Gabrillin, Abba. (2017). Efek Rumah Kaca Ikut Peringati Aksi Kamisan ke-500 di Depan Istana. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/27/10533231/efek-rumah-kaca-ikut-peringati-aksi-kamisan-ke-500-di-depan-istana> Diakses pada tanggal 5 Februari 2020.
- Ihsanuddin. (2014). Koalisi Indonesia Hebat Akan Layangkan Mosi Tidak Percaya kepada Pimpinan DPR. <https://nasional.kompas.com/read/2014/10/29/15222141/Koalisi.Indonesia.Hebat.Akan.Layangkan.Mosi.Tidak.Percaya.kepada.Pimpinan.DPR> diakses pada tanggal 5 Januari 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/reformasi> Diakses pada tanggal 2 Februari 2020.
- Movanita, Ambaranie. (2016). Kontras: Wiranto Ada di Deret Terdepan Atas Sejumlah Pelanggaran HAM. <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/27/14565681/kontras.wiranto.ada.di.deret.terdepan.atas.sejumlah.pelanggaran.ham?page=all> Diakses pada tanggal 2 Februari 2020.

- Nugraha, Indra. (2019). <https://www.mongabay.co.id/2019/10/22/kebakaran-hutan-dan-lahan-sampai-september-2019-hampir-900-ribu-hektar/> diakses pada tanggal 10 Januari 2020.
- Nugraha, Indra. (2019). Kebakaran Hutan dan Lahan Sampai September 2019 Hampir 900 Ribu Hektar. <https://www.mongabay.co.id/2019/10/22/kebakaran-hutan-dan-lahan-sampai-september-2019-hampir-900-ribu-hektar/> Diakses pada tanggal 6 Februari 2020.
- Prabowo, Dani. 2019. “Pilkada Asimetris antara Politik berbiaya mahal dan evaluasi parpol.” <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/22/06442131/pilkada-asimetris-antara-politik-berbiaya-mahal-dan-evaluasi-parpol> diakses pada tanggal 23 Januari 2020.
- Putri, Aditya. (2019). Pembakaran Hutan: Elite yang Untung Peladang yang Disalahkan. <https://tirto.id/pembakaran-hutan-elite-yang-untung-peladang-yang-disalahkan-eikd> Diakses pada tanggal 6 Februari 2020.
- Raditya, Iswara. (2019). Kronologi Sejarah Aksi Gejayan & Demonstrasi Mahasiswa 1998. <https://tirto.id/kronologi-sejarah-aksi-gejayan-demonstrasi-mahasiswa-1998-eizn> Diakses pada tanggal 1 Februari 2020.
- Ristiano, Christoforus. (2019). 8 Fakta Tentang 12 Tahun Aksi Kamisan, Hanya Sekali diajak Masuk Istana. <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/12072721/8-fakta-tentang-12-tahun-aksi-kamisan-hanya-sekali-diajak-masuk-ke-istana?page=all> Diakses pada tanggal 28 Januari 2020.
- Rizal, Adam. (2019). Demografi Pengguna Instagram di RI 2019, Paling Banyak Perempuan. <https://infokomputer.grid.id/read/121964120/demografi-pengguna-instagram-di-ri-2019-paling-banyak-perempuan> Diakses pada tanggal 1 Februari 2020.
- Taufiqurrahman, Muhammad. (2019). #MosiTidakPercaya How an indie song became the anthem of a generation. <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/09/29/mositidakpercaya-how-an-obscure-indie-song-became-the-anthem-of-a-generation.html> Diakses pada tanggal 5 Februari 2020.
- The Jakarta Post. (2019). #ReformCorrupted. <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/09/25/reformcorrupted-1569384427.html> Diakses pada tanggal 2 Februari 2020.
- Tim Indonesia Leaks. Indonesialeaks Bukti Baru Buku Merah. (2019). <https://investigasi.tempo.co/317/indonesialeaks-bukti-baru-buku-merah> Diakses pada tanggal 29 Januari 2020
- Walhi.id. (2019) <https://walhi.or.id/dalam-pusaran-oligarki-masa-depan-suram-membayangi-pemerintahan-indonesia-maju> diakses pada tanggal 22 Januari 2020.
- Wijaya, Muhammad Akbar. (2014). Kubu Prabowo Hatta Sampaikan Mosi Tidak Percaya KPU ke DPR. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/06/n9vscq-kubu-prabowohatta-sampaikan-mosi-tidak-percaya-kpu-ke-dpr> diakses pada tanggal 5 Januari 2020.

